



BADAN PUSAT STATISTIK
PUSAT PENYIARAN DAN PELATIHAN

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun Anggaran 2019



Address : Jl.Raya Jagakarsa No.70

Phone : (021) 7873782-83

E-mail : pusdiklat@bps.go.id

Fax : (021) 7873955, 7875497



pusdiklat.bps.go.id



@PusdiklatBPS



Pusdiklat BPS Page



Pusdiklat BPS



[pusdiklat.bps](https://www.instagram.com/pusdiklat.bps)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS sebagai penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusdiklat BPS atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2019.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS tahun 2015-2019. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang.

Pimpinan Pusdiklat BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2020

Kepala Pusdiklat BPS



Marsudijono, S.Si, MM *Sm*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
1.5. Potensi dan Permasalahan	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	13
PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019	17
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2019	20
AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019	25
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2018	29
3.3. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2015-2019	69
3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2019	72
3.5. Upaya Efisiensi	73
3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2019	74

PENUTUP	86
4.1. Tinjauan Umum	86
4.2. Tindak Lanjut	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019.....	19
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019	21
Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator	22
Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2019.....	26
Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2019.....	29
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2019	31
Tabel 7. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2019.....	65
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2019.....	66
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2019.....	70
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2015-2019.....	71
Tabel 11. Pagu Anggaran Menurut Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2019	75
Tabel 12. Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 (Juta rupiah)	77
Tabel 13. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun Anggaran 2019 (Juta Rupiah).....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS	7
Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan	8
Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	9
Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS	20
Gambar 5. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II	34
Gambar 6. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan II	35
Gambar 7. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	36
Gambar 8. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	37
Gambar 9. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV	38
Gambar 10. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV	39
Gambar 11. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III	40
Gambar 12. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III	41
Gambar 13. Pembukaan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	44
Gambar 14. Kegiatan Olahraga Pagi Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	45
Gambar 15. Pembelajaran di kelas Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP)	46
Gambar 16. Suasana Pembelajaran Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP)	48
Gambar 17. Pembukaan dalam rangka Diklat Penulisan KTI	49
Gambar 18. Seminar Kertas Kerja Kelompok Diklat Teknis Komputer	50
Gambar 19. Kegiatan Pembelajaran Diklat Statistisk Sektoral	51
Gambar 20. Kegiatan Ujian Sertifikasi Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	53
Gambar 21. Kegiatan Pembelajaran Klasikal Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen	54
Gambar 22. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Diklat Teknis Pelaku	55
Gambar 23. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Pelatihan Unit Kompetensi Bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	56
Gambar 24. Kegiatan Ujian Sertifikasi Kursus Bendaharawan	58
Gambar 25. Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3, Tahun 2019	61
Gambar 26. Wisuda Peserta TB APBN BPS S2 UGM MKK Tahun 2019	63
Gambar 27. Workshop Pengelolaan Beasiswa TB dan Apresiasi Mitra Pemberi Beasiswa Tahun 2019	63
Gambar 28. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama TB S2 Unair Tahun 2019	64

Gambar 29. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Unhas dan BPS RI Tahun 2019	64
Gambar 30. Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2019	81
Gambar 31. Penyerahan Sertifikat Akreditasi oleh LAN RI	82
Gambar 32. Penyerahan Pusdiklat Berprestasi oleh LAN RI	82
Gambar 33. Penghargaan dari UI	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019.....	91
Lampiran 2. Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019.....	92
Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2019	93
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2019.....	96
Lampiran 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015 - 2019	97
Lampiran 6. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2019.....	98
Lampiran 7. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan Akhir Tahun 2019	99
Lampiran 8. Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2019	100
Lampiran 9. Diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS Tahun 2019	101
Lampiran 10. Kalender Diklat Pusdiklat BPS Tahun 2019	102
Lampiran 11. Sertifikat Akreditasi	103
Lampiran 12. Piagam Penghargaan	104

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis, dan 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2019.

Tujuan capaian kinerja Pusdiklat BPS adalah “Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima”. Tujuan ini diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Pada tahun 2019, angka capaian kinerja menurut tujuan telah mencapai 93,11 persen. Dengan angka diatas 90 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2019 cukup memuaskan dengan mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Namun, diperlukan kerja keras lagi dari semua pihak agar capaian kinerja dapat mencapai sesuai target bahkan melebihi dari target yang diharapkan.

Tujuan tersebut dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Pada tahun 2019, rata-rata capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi target atau diatas 100 persen yaitu mencapai 103,65 persen.

Pada sasaran strategis pertama, Pusdiklat BPS selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan diklat aparatur BPS yang prima dibuktikan dengan adanya perbaikan layanan terhadap peserta sehingga peserta dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan widyaiswara/pengajar dengan baik. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan baik dari sisi teknis dalam proses pembelajaran seperti sistem pembelajaran *e-learning*, penyampaian materi oleh widyaiswara/pengajar maupun non teknis berupa sarana dan prasarana yang tersedia.

Perbaikan layanan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap persentase kelulusan peserta diklat. Sejalan dengan itu, capaian kinerja dari indikator “Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan” telah melampaui target yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 105,26 persen. Angka kelulusan tersebut menunjukkan bahwa peserta diklat kepemimpinan III dan IV telah berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal dengan mengubah

pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta diklat prajabatan mereka telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing.

Begitu pula untuk indikator "Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik", "Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan jasa yang lulus" dan "Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang lulus" dengan nilai capaian berturut-turut adalah sebesar 109,05 persen, 109,52 persen dan 112,5 persen. Sementara itu, indikator sasaran "Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan" sesuai dengan target yang diharapkan (100 %).

Pada sasaran strategis yang kedua, Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan didukung oleh indikator "Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat". Indikator tersebut telah melebihi dari target yang diharapkan yaitu dengan realisasi 70,39 poin dari target PK 2019 sebesar 70 poin sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,56 persen. Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meskipun secara rata-rata capaian indikator sasaran telah melebihi dari target yang diharapkan, masih terdapat indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) indikator "Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat" dengan capaian kinerjanya sebesar 93,11 persen, dan (2) indikator "Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS" capaian kinerjanya sebesar 99,16 persen.

Kedua indikator tersebut di atas menghasilkan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan target tahun-tahun sebelumnya pada Renstra periode tahun 2015-2019. Untuk itu, dalam mempersiapkan Renstra periode tahun 2020-2024 perlu digali informasi lebih dalam lagi pada proses perencanaan menentukan target indikator-indikator tersebut atau mencari solusi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusdiklat BPS periode tahun 2020-2024, tindak lanjut tidak hanya dilakukan terhadap indikator yang capaiannya kurang dari 90 persen, namun perlu juga dilakukan penajaman terhadap beberapa indikator/IKU sehingga pengukuran keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS menjadi lebih relevan.

Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2019 adalah Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Diklat tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2019 yang diperuntukkan bagi calon pegawai lulusan STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik)

tahun 2018 dan calon pegawai penerimaan formasi umum baik golongan III maupun golongan II tahun 2018. Penempatan skala prioritas pada kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan II dilakukan untuk mengantisipasi terkait peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa percobaan Calon PNS yang hanya berlaku 1 (satu) tahun.

Pada tahun ini, kegiatan diklat teknis yang masih menjadi prioritas berkaitan dengan sertifikasi. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai dalam rangka penguatan administrasi keuangan BPS. Untuk itu Pusdiklat menyelenggarakan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Bendaharawan, Pelatihan Unit Kompetensi Tertentu bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Diklat Okupasi dan Sertifikasi PPK. Diklat yang juga menjadi prioritas adalah Pelatihan Statistik Sektoral yang pesertanya dari Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan BPS di setiap provinsi. Penguatan dalam bidang statistik sektoral dilaksanakan dalam rangka Satu Data Indonesia dan *National Strategic for Development of Statistic (NSDS)*.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada TA 2019 Pusdiklat BPS mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp 68.649,82 juta telah direalisasikan anggaran sebanyak Rp 65.135,64 juta atau sekitar 94,88 persen. Untuk output Layanan Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan anggaran sebesar 91,47 persen yaitu Rp 33.795,04 juta dari pagu anggaran Rp 36.948,47 juta. Output Layanan Dukungan Manajemen Satker merupakan output yang baru pertama kali muncul pada tahun anggaran 2019. Anggaran pada output ini digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan diklat dan kegiatan rintisan pendidikan gelar. Dari pagu anggaran sebanyak Rp 14.459,96 juta telah direalisasikan Rp 14.275,73 juta atau sebesar 98,75 persen. Penyerapan anggaran pada output Layanan Perkantoran adalah sebesar 98,92 persen yaitu Rp 16.426,11 juta dari pagu anggaran Rp 16.605,63 juta, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Sementara itu, pada Program PSPA yaitu output Layanan Internal direalisasikan sebesar 100,00 persen, dengan anggaran sebanyak Rp 635,76 juta.

BAB I

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah). Selain sebagai evaluasi atau upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya untuk tahun yang akan datang juga menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, terutama indikator-indikator dalam pencapaian kinerja yang telah diraih satker pada instansi pemerintah, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan hal ini seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 18. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan pada akhir tahun anggaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah non kementerian yang memiliki struktur organisasi di bidang teknis, sekretariat dan pengawasan. Struktur bidang sekretariat terdiri dari biro perencanaan, administrasi keuangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPS, biro umum, hubungan masyarakat maupun kepegawaian dan hukum.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengembangkan kompetensi SDM BPS seluruh Indonesia, sebagai satuan kerja (satker)/perangkat organisasi seperti di dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, pada Bab X Pasal 393 menyebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta teknis dan fungsional.

Pusdiklat BPS adalah unsur pelaksana BPS berperan penting dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam hal ini

pegawai di lingkungan BPS maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) BPS secara umum. Selain itu juga mengelola tugas belajar dan izin belajar serta mengadakan seminar/workshop yang berkaitan dengan statistik dan teknologi informasi.

Visi Pusdiklat BPS menurut Reviu Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019 adalah “Pusdiklat BPS sebagai Pusat Unggulan Pelatihan Statistik dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Negara yang Kompeten dan Profesional, Berintegritas serta Amanah”. Dalam pencapaian visi tersebut disusunlah misi pertama yaitu mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional; kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program Diklat statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks; ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola Diklat serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik; dan yang keempat, menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana Diklat statistik dan komputasi yang memadai.

Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2019 yaitu meningkatnya layanan Diklat aparatur BPS yang prima serta meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Dari setiap sasaran strategis tersebut dibuatlah 7 (tujuh) indikator sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan indikator tersebut Pusdiklat BPS menetapkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun 2019.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja bagi setiap instansi pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusdiklat BPS kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan anggaran dan barang milik Negara dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2019.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
Pusdiklat merupakan unit kerja setingkat Eselon II pada BPS yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Jakarta Selatan 12620.
2. Tugas
Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan tata usaha
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
4. Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah sebagai berikut:
 1. Kepala
Kepala Pusdiklat BPS adalah pejabat Eselon IIa
 2. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi dua Kepala Subbagian setingkat Eselon IVa yaitu:
 - a. Subbagian Tata Usaha Umum; dan
 - b. Subbagian Rumah Tangga

3. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan

4. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

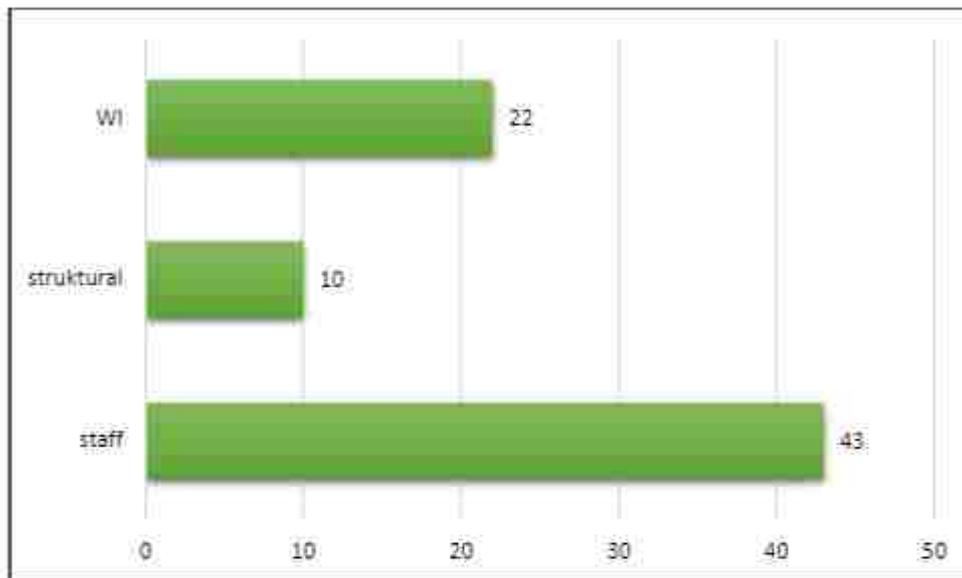
Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Widyaiswara.

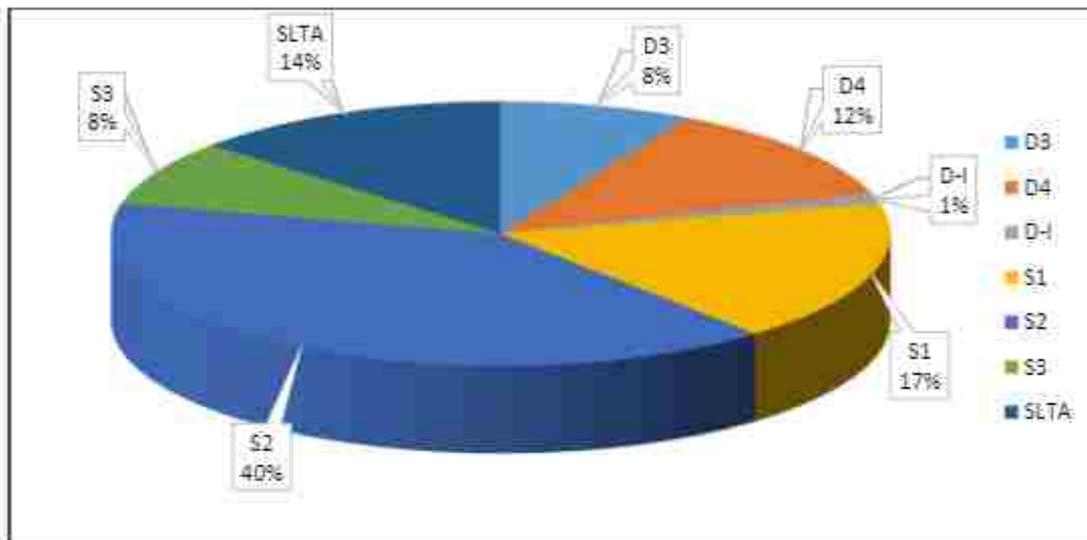
Bagan Struktur Organisasi Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat tidak terlepas dari peranan para pengajar diklat. Pejabat fungsional widyaiswara merupakan SDM Pusdiklat BPS yang berperan sebagai tenaga pengajar diklat. Fungsional widyaiswara di Pusdiklat BPS berjumlah 22 orang terdiri dari 1 orang Fungsional Pertama, 11 orang Fungsional Muda, 8 orang Fungsional Madya, dan 2 orang Fungsional Utama. Semakin berkembangnya diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai BPS yang secara tidak langsung juga mendukung data BPS yang lebih berkualitas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu unsur yang secara tidak langsung berperan dalam peningkatan kualitas SDM adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan Gambar 3 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2019 komposisi SDM terbesar berada pada tingkat pendidikan S2 yaitu mencapai 40 persen. Bahkan jika dilihat komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-III telah mencapai 8 persen dari total keseluruhan pegawai sebanyak 75 orang. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum SDM Pusdiklat BPS telah mencerminkan kualitas yang cukup baik sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ke arah yang lebih baik.



Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Perkembangan teknologi informasi (TI) semakin pesat, Pusdiklat BPS hingga kini masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai data scientist. Padahal, kebutuhan tenaga yang ahli dalam bidang big data ini sangat besar.

Untuk memenuhi kebutuhan akan perkembangan teknologi tersebut, SDM Pusdiklat BPS telah melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan Data Science yang berjumlah 6 orang.

1.5. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS di era Industri 4.0, Pusdiklat sebagai penyelenggara diklat mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar untuk lebih meningkatkan pelayanan, baik dari sisi peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan materi diklat yang beragam yang berbasis elektronik sesuai dengan yang dibutuhkan BPS. Dalam rangka menghadapi tantangan Teknologi Industri 4.0, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi baik dari sisi Pusdiklat sebagai penyelenggara diklat maupun dari sisi peserta dan aturan-aturan yang diterapkan dari pihak LAN RI.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil telah merubah sistem pembelajaran yang semula hanya klasikal menjadi *blended learning*. Berdasarkan peraturan baru tersebut, maka pada tahun 2019 Pusdiklat BPS telah memulai melaksanakan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan III berbasis elektronik. Peserta LATSAR sebelum mengikuti materi secara klasikal (*on campus*) diwajibkan untuk mempelajari materi Diklat terlebih dahulu secara *e-learning*

dan mengikuti ujian jarak jauh yang disebut dengan program BOC (*Before on Campuss*). Hal ini dimaksudkan agar Peserta telah siap terlebih dahulu dengan materi yang akan didiskusikan dalam sistem pembelajaran *on-campuss*.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan Peserta Diklat, selain sistem *blended learning*, peserta juga diwajibkan untuk mengikuti *pretest* dan *post test* selama pembelajaran *on campuss*. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca peserta terhadap bahan materi yang akan diajarkan di kelas, sehingga Peserta lebih siap berpartisipasi dalam diskusi di kelas dengan fasilitator. Selain itu untuk evaluasi peserta LATSAR melalui test sudah menggunakan sistem evaluasi berbasis elektronik (*Computer Based Test/CBT*) dimana peserta mengikuti ujian komprehensif langsung menggunakan komputer sehingga validitas hasil dapat dijamin kerahasiaan dan objektivitasnya. Sistem pembelajaran *blended learning* dan *CBT* ini menjadi tantangan baru dari Pusdiklat terutama dalam kesiapan sarana pendukungnya baik dari segi materi/bahan pembelajaran, soal, fasilitator/widyaiswara, server dan jaringan wifi untuk memperlancar pelaksanaannya.

Lama diklat yang cukup panjang selama 113 hari pada LATSAR yang diselenggarakan tahun 2018 berdampak pada penyelesaian beberapa angkatan Latsar yang seminar evaluasinya harus dilaksanakan pada tahun 2019. Disamping itu pada tahun 2019 telah terjadi peningkatan jumlah Peserta LATSAR yang mengikuti dikarenakan adanya CPNS baru selain lulusan Politeknik Statistik sebanyak 507 orang, juga adanya penerimaan CPNS dari jalur regular sebanyak sekitar 315 orang. Hal tersebut menyebabkan pada tahun 2019 Pusdiklat BPS hanya bisa menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 3 angkatan (105 orang) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 1 angkatan (40 orang). Padahal berdasarkan data nominasi peserta Diklatpim Tingkat IV keadaan pada bulan Februari 2019, jumlah pegawai yang belum mengikuti Diklat sekitar 500 orang terdiri dari pegawai BPS Pusat dan daerah. Hal tersebut karena adanya keterbatasan daya tampung peserta diklat untuk ketersediaan akomodasi dan ruang kelas di Pusdiklat dan anggaran. Diharapkan pada tahun berikutnya Pusdiklat BPS bisa menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas melalui pola kerjasama dengan BPS daerah atau lembaga diklat di daerah sehingga pegawai BPS yang belum mengikuti Diklat PKP menjadi semakin berkurang, mengingat setiap tahunnya jumlah pegawai yang dilantik menjadi pejabat eselon IV atau pengawas selalu bertambah.

Selain itu, data pada keadaan bulan Februari 2019 tersebut terdapat pula Kementerian/Lembaga lain yang ingin bekerjasama yang akan mengirimkan sekitar 26 orang pegawainya untuk mengikuti Diklatpim Tingkat IV di Pusdiklat BPS. Namun karena keterbatasan waktu dan tempat tidak dapat bekerjasama. Pusdiklat BPS hanya dapat

menerima Kementerian/Lembaga lain yang mengikuti LATSAR CPNS Gol III dari Kementerian Sosial (1 orang) dan Gol II dari Bakamla (46 orang), LKPP (3 orang) dan Bengkulu Utara (15 orang).

Di sisi lain, dalam rangka menambah wawasan dan pengalaman dari lembaga diklat lain serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat di Pusdiklat BPS, telah dikirimkan Pejabat Eselon III sebanyak 1 orang untuk mengikuti Diklatpim III di LAN RI Jakarta.

Sejalan dengan semakin beragam kebutuhan diklat, terutama diklat teknis dan fungsional, dibutuhkan tenaga pengajar/widyaiswara yang sesuai dengan kompetensinya, hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Selain itu, Pusdiklat juga harus menerapkan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dengan pola baru yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kendala yang dihadapi adalah kurangnya widyaiswara dengan kompetensi materi sesuai kurikulum pola baru tersebut. Untuk mengatasi kendala diatas telah dilakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi para pengajar melalui berbagai diklat, tugas belajar dan Diklat *Training of Trainers* (TOT) Substansi Kewidyaiswaraan Pim III dan IV kerjasama Pusdiklat BPS dan LAN RI. Diantaranya adalah diselenggarakannya Workshop PKP dan PKA pada bulan Desember 2019 yang diikuti oleh hampir seluruh Widyaiswara dan pejabat struktural, maka ini menjadi potensi yang unggul dalam meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005/K.1/Pdp.07/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1007/K.1/Pdp.07/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Demikian pula dengan kompetensi penguasaan materi teknis yang baru yaitu tentang *Big Data* dan *Data Science* untuk memenuhi kebutuhan materi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini tentang statistik dan komputasi.

Dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional terdapat beberap peluang baru untuk pengembangan penyelenggaraan diklat. Salah satunya adalah dalam rangka memenuhi peningkatan akuntabilitas instansi dan mempertahankan prestasi WTP yang sudah dicapai BPS, maka perlu diberikan penguatan peran PPK dan ketersediaan bendahara yang bersertifikasi. Untuk itu Pada Tahun 2019 juga telah diselenggarakan Diklat Okupasi PPK dan Sertifikasi Bendahara. Penyelenggaraan Diklat ini dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penyedia fasilitator/pengajar dan materinya. Permasalahan yang kadang muncul adalah adanya kendala koordinasi dengan LKPP dalam menentukan jadwal pelaksanaan, sehingga kadang-

kadang pelaksanaan terlalu mendadak sehingga persiapannya kurang optimal seperti batas waktu antara pendaftaran pelatihan dan ujian *on-line* terlalu singkat yaitu 2 minggu dan aplikasi pendaftaran dari LKPP kurang mudah dipahami, selain itu calon peserta diklat dari BPS Provinsi banyak mengalami pergantian. Antisipasi yang dilakukan adalah menunjuk salah satu staf sebagai PIC dalam melakukan pendaftaran *on-line* dan dilakukan peningkatan koordinasi dengan LKPP untuk meningkatkan mutu persiapan dan pelaksanaannya.

Disamping itu dengan adanya Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan dalam rangka strategi nasional untuk pengembangan statistik (*National Strategy of Development Statistics/NSDS*) maka perlu penguatan statistik sektoral. Pada Tahun 2019 adalah yang pertama kali Pusdiklat membina hubungan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan Diklat Statistik sektoral yang pesertanya adalah "Wali Data" dari Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan BPS di setiap provinsi. Guna meningkatkan kompetensi ASN dibidang statistik juga telah dibangun beberapa sistem pembelajaran baru melalui *E-Learning MS-Excell*, *SMART-STAT* dan WARKOP (Warung Kompetensi) dimana peserta bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media elektronik.

Dalam hal penyelenggaraan pengiriman Staf dalam Tugas Belajar telah ditingkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memperluas bidang studi sesuai kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan organisasi BPS yang perlu penguatan pegawai yang kompeten dalam hal akuntansi maka mulai tahun 2019 dibuka program S2 Akuntansi. Dalam hal kebutuhan organisasi BPS yang akan membuat unit baru yaitu assesment center, maka telah dibuka program baru S2 bidang psikologi. Selanjutnya untuk memenuhi kompetensi bidang hukum bagi pegawai BPS, maka dirintis kerjasama dengan beberapa fakultas hukum untuk membuka program S2 bidang Hukum yang akan dimulai Tahun 2020.

Dalam menjawab permasalahan yang terjadi di tahun 2018 dan memperlancar kegiatan-kegiatan baru di tahun 2019 yang berbasis Teknologi Infromasi, maka telah banyak dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung IT. Pengembangan IT yang telah dilakukan pada tahun 2019 diantaranya adalah penambahan *Bandwith* dari 20 MBps menjadi 50 MBps, penggantian server lama dengan 2 unit server baru, pengadaan studi mini untuk menyiapkan video sebagai materi dalam sistem e-learning, penambahan 5 unit *PC*, 1 unit *printer*, 4 unit *Access Point*, 1 unit viewer biasa dan 1 unit *viewer touchscreen*. Peningkatan tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung adanya sistem baru dalam proses penyelenggaraan diklat yang berbasis IT, namun demikian tentunya masih harus terus dikembangkan untuk memenuhi jenis-jenis diklat jarak jauh yang semakin terus beragam jenis dan jumlahnya.

Sarana dan prasarana pendukung lainnya yang telah dikembangkan sebagai potensi yang dimiliki Pusdiklat BPS adalah dengan adanya penambahan sekat-sekat ruang kelas sehingga memungkinkan penambahan kelas yang berukuran kecil sebagai ruang diskusi dan evaluasi diklat, penyempurnaan ruang widyaiswara yang sangat membantu meningkatkan produktivitas widyaiswara, serta peningkatan kualitas ruang conference, ruang karaoke, ruang poliklinik dan Lobby yang dapat menambah kesegaran seluruh peserta diklat yang ada di Pusdiklat BPS sehingga bisa menunjang keberhasilan peserta diklat.

Dengan perubahan sistem dan penambahan/penyempurnaan sarana dan prasarana kediklatan tersebut, maka Pusdiklat telah mampu menyerap anggaran yang sangat baik, yaitu mencapai 94,88 persen pada tahun 2019. Namun, berdasarkan hasil evaluasi nilai dari indikator Kualitas Penggunaan Anggaran (IKPA) baru mencapai 74,6 persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2020 untuk bisa meningkatkan nilai IKPA dengan mengatasi segala permasalahan yang ada di tahun 2019 baik secara teknis maupun administrasi.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumberdaya manusia (SDM); potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS 2019.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Pusdiklat BPS 2019; Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra 2015-2019; Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS 2019; Upaya Efisiensi Pusdiklat BPS 2019; Realisasi Anggaran tahun 2019; dan Penghargaan tahun 2019
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Pusdiklat BPS menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Statistik.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019. Renstra tersebut dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja seluruh aparat Pusdiklat BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan statistik, utamanya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang menyelenggarakan diklat, Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang berkontribusi untuk pengembangan SDM. Visi yang disusun Pusdiklat BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

"Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah"

Visi Pusdiklat BPS tersebut sejalan dengan arah pembangunan BPS sebagaimana termuat dalam Renstra BPS 2015-2019 dengan visi "Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua" dan sesuai dengan misi BPS untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan, dan membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah.

Pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah (PIA) menjadi sangat penting diwujudkan dalam rangka pembangunan bidang SDM.



Gambar 4. Nilai-Nilai Inti BPS

> Profesional

"Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas".

> Integritas

"Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)".

> Amanah

"Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik".

Dengan Visi Pusdiklat BPS 2015-2019, eksistensi Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan dan pelatihan statistik menjadi semakin penting, karena sangat berperan dalam pembangunan bidang SDM guna menunjang upaya BPS meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Selain itu, visi Pusdiklat BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang statistik melalui keikutsertaan aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik

secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik.
4. Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai.

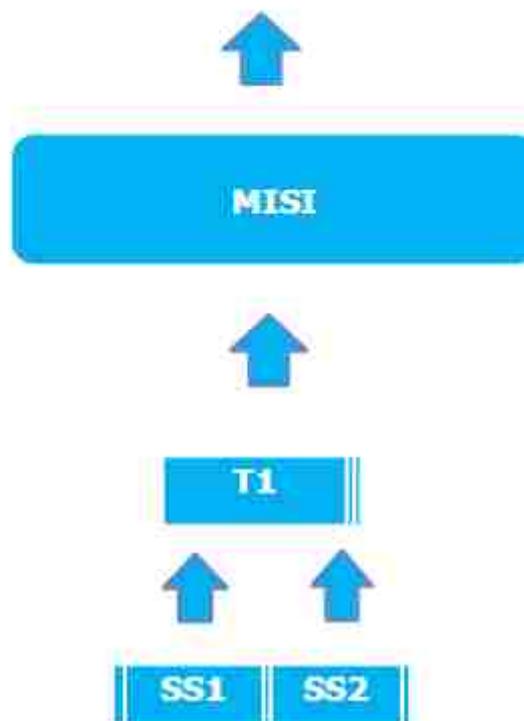
Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusdiklat BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Mulai tahun 2017, terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis sehingga dibuat Review Renstra 2015-2019. Berdasarkan Review Renstra tersebut, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima	SS1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima
	SS2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Pusdiklat BPS mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kerjanya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

"Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah"



Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2019

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Target yang telah ditetapkan menjadi acuan capaian atau realisasi kinerja instansi. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Di dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS, target yang ditetapkan berasal dari beberapa indikator kinerja yang dapat mewakili hasil kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitor setiap triwulanan, kemudian

dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,50
Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	95,00
	Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00
	Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	80,00
	Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus	Persen	80,00
	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,50
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00
	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	119
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Pusdiklat BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Sasaran/Indikator	Bagian Tata Usaha	Bidang DPK	Bidang DTF
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima			
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	*	*	*
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	*	*	*
Persentase peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang lulus	*	*	*
Persentase peserta Diklat Bendaharawan yang lulus	*	*	*
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	*	*	*
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	*		
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	*		
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan			
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	*	*	*

Keterangan:  : Penanggung Jawab * : Kontributor

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019

Capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2019 diperoleh berdasarkan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2018 dan data realisasinya dapat diperoleh sesuai kegiatan yang dilakukan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Pusdiklat BPS mempunyai satu tujuan capaian kinerja yaitu "Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima", diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Tujuan tersebut dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Bila dilihat menurut indikator tujuan yaitu "Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima", rata-rata capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 93,11 persen (Tabel 4). Dengan angka diatas 90 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2019 cukup memuaskan dengan mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Namun, diperlukan kerja keras lagi dari semua pihak agar capaian kinerja dapat mencapai sesuai target bahkan melebihi dari target yang diharapkan.

Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,50	85,20	93,11
SS1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	95,00	100,00	105,26
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00	103,60	109,05
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	80,00	87,62	109,52
Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus	Persen	80,00	90,00	112,50
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,50	85,20	93,11
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	119	118	99,16
SS2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70	70,39	100,56
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan				93,11
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,65

Di sisi lain, jika dilihat menurut indikator sasaran, yaitu "Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima" serta "Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan", rata-rata capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi target atau diatas 100 persen yaitu mencapai 103,65 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari masing-masing indikator sasaran strategis yang sebagian besar capaian kerjanya lebih dari 100 persen.

Indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya lebih dari 100 persen adalah "Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori

memuaskan" (105,26 %), "Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik" (109,05 %), "Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan jasa yang lulus (109,52 %), dan "Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang lulus (112,50 %). Hal ini menunjukkan bahwa peserta diklat dapat menerima materi dengan baik berkat bimbingan dan arahan dari pengajar/widyaiswara. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat juga telah sedikit melebihi dari target yang diharapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,56 persen. Sementara itu, indikator sasaran "Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan" sesuai dengan target yang diharapkan (100 %).

Meskipun secara rata-rata capaian indikator sasaran telah melebihi dari target yang diharapkan, masih terdapat indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) indikator "Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat" dengan capaian kinerjanya sebesar 93,11 persen, dan (2) indikator "Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS" capaian kinerjanya sebesar 99,16 persen.

Pada indikator "Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat", capaian kinerjanya dapat dikatakan cukup memuaskan meskipun kurang dari 100 persen. Salah satu hal yang menyebabkan capaian kinerja tidak mencapai target adalah ketidakpuasan peserta terhadap akomodasi, konsumsi, dan sarana prasarana yang disediakan. Selain itu, tenaga kesehatan (dokter) yang hanya 2 (dua) kali seminggu datang ke Pusdiklat sehingga ketika ada peserta yang sakit pada hari non visit dokter, tidak ada dokter yang memeriksa.

Pada indikator "Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat", capaian kinerjanya dapat dikatakan cukup memuaskan meskipun kurang dari 100 persen. Salah satu hal yang menyebabkan capaian kinerja tidak mencapai target adalah ketidakpuasan peserta terhadap akomodasi, konsumsi, dan sarana prasarana yang disediakan. Selain itu, tenaga kesehatan (dokter) yang hanya 2 (dua) kali seminggu datang ke Pusdiklat sehingga ketika ada peserta yang sakit pada hari non visit dokter, tidak ada dokter yang memeriksa.

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan penyelenggaraan diklat adalah evaluasi diklat. Evaluasi diklat dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas diklat. Selain evaluasi yang dilakukan pada saat diklat berlangsung diperlukan juga evaluasi pasca diklat (EPD). EPD merupakan alat untuk mendiagnosis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan diklat. Dengan EPD, keberhasilan dan kekurangan diklat dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil EPD akan menjadi masukan (*feedback*) yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas diklat dan menjaga keberlanjutan organisasi penyelenggara diklat. EPD menjadi alat ukur serta merupakan proses evaluasi diklat yang komprehensif untuk

menangkap adanya kontribusi pengembangan SDM. Hasilnya akan memberikan data penting kepada semua pemangku kepentingan yang dapat dijadikan alat komunikasi bagi pengembangan SDM kepada organisasi. EPD menggunakan 2 (dua) metode yaitu survei daring dan survei wawancara mendalam (*indepth interviews*). Hasil EPD dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Diklatpim III, Diklatpim IV, dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Uraianya meliputi deskripsi umum, dampak diklat terhadap sikap dan perilaku, dan dampak diklat terhadap kinerja alumni serta implementasi proyek perubahan (bagi alumni Diklatpim) dan pelaksanaan aktualisasi teknis substansi (bagi alumni Latsar).

Berdasarkan hasil Evaluasi Pasca Diklat diperoleh kesimpulan, yaitu Diklat secara umum berdampak pada peningkatan sikap dan perilaku alumni diklat sebagai ASN. Tingkat integritas dan cara berkolaborasi pimpinan eselon III dan eselon IV alumni Diklatpim dalam kategori memuaskan memuaskan. Sikap dan perilaku alumni Latsar Golongan III, diantaranya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, *whole government* dan pelayanan publik dalam kategori memuaskan, sementara manajemen ASN dalam kategori cukup memuaskan sehingga perlu ada perlakuan meningkatkan kondisi tersebut; Tingkat kinerja alumni Diklatpim secara umum memuaskan. Tingkat kinerja alumni Latsar CPNS Golongan III masuk kategori memuaskan; Implementasi proyek perubahan alumni Diklatpim III dan Diklatpim IV dalam jangka menengah dan panjang masih sangat rendah; dan Pelaksanaan aktualisasi substansi alumni Latsar CPNS Golongan III berjalan dengan baik serta bermanfaat bagi pengembangan kepribadian alumni, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan kinerja di unit kerja.

Indikator kedua yang capaian kinerjanya kurang dari target yang diharapkan adalah "Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS". Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan diperoleh SDM yang lebih berkualitas. Namun pada tahun 2019, capaiannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dari target sebanyak 119 pegawai, terealisasi 118 pegawai mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Hal ini dikarenakan rintisan gelar pada program Strata 3 (S3) Institut Teknologi Bandung (ITB) tidak ada yang mendaftar sehingga peserta tugas belajar berkurang satu.

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan, hal ini tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar meskipun masih ada beberapa indikator yang belum

berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai usaha akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2018

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi Pusdiklat BPS yaitu "Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah", ditetapkan tujuan capaian kinerja yaitu "Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima".

Tujuan capaian kinerja Pusdiklat BPS digambarkan melalui indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa berdasarkan target PK 2019 sebesar 91,50 persen diperoleh realisasi persentase kepuasan peserta diklat sebesar 85,20 persen. Dari angka tersebut dihasilkan capaian kinerja tujuan sebesar 93,11 persen. Hal ini menggambarkan bahwa hampir seluruh peserta diklat merasakan kepuasan terhadap penyelenggaraan diklat, meskipun belum 100 persen mengingat masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2019

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Realisasi 2018	Perubahan terhadap realisasi 2018 (%) $((3)/(5) \times 100) - 100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	91,50	85,20	93,11	89,51	- 4,82

Pada Lampiran 5, Tingkat Pencapaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKU Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik dari tahun 2015 hingga 2019 bervariasi di mana capaian kinerja tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 111,11 persen dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 102,17 persen. Namun demikian, mulai tahun 2017 capaian kinerja indikator tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2019 mencapai 109,05 persen.

Bidang Diklat Teknis dan Fungsional sudah menyelenggarakan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa mulai tahun 2015. Namun demikian, indikator Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus mulai ada di Perjanjian Kinerja Bidang Diklat Teknis dan Fungsional sejak tahun 2017. Dalam kurun waktu 2017-2019, capaian kinerja indikator tersebut meningkat terus yaitu pada tahun 2017 sebesar 100 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 107,68 persen dan menjadi 109,52 persen pada tahun 2019.

SASARAN 1 : MENINGKATNYA LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR BPS YANG PRIMA

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, Pusdiklat juga menyelenggarakan pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi pegawai BPS yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2019

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Realisasi 2018	Perubahan terhadap realisasi 2018 (%) ((3)/(5)*100)-100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	95,00	100,00	105,26	97,00	3,09
Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	95,00	103,60	109,05	98,87	4,78
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	80,00	87,62	109,52	86,14	1,72
Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus	80,00	90,00	112,50	-	-
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	91,50	85,20	93,11	89,51	-4,82
Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100	0
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	119	118	99,16	118	0
Rata rata Capaian Kinerja			103,65		

Sejalan dengan itu, sasaran pertama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS dalam aspek layanan pendidikan dan pelatihan diukur melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran ini dapat dikatakan telah tercapai bahkan melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,65 persen. Bila dilihat secara periode Renstra Pusdiklat Tahun 2015-2019, bahwa rata-rata capaian kinerja setiap tahun berada pada angka diatas 100 persen, kecuali pada tahun 2017 sebesar 95,43 persen (Tabel 7).

Target dan pencapaian tahun 2019 serta perbandingan terhadap realisasi tahun 2018 pada masing-masing IKU dapat dilihat pada Tabel 6.

Bila dibandingkan dengan target 2019, pada sasaran pertama terdapat 3 (tiga) IKU yang tingkat capaian kerjanya melampaui dari target yang ditetapkan. Indikator tersebut adalah Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan, indikator Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik, dan Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus. Sementara itu, hanya 1 (satu) IKU yang sesuai dengan target yaitu indikator Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan. Sedangkan untuk indikator yang kurang dari target terdapat 2 (dua) indikator yaitu indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat dan indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS. Indikator-indikator tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. IKU 1 : Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang Lulus dengan Kategori Memuaskan

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pegawai, diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang memadai baik dari sisi kemampuan teknis maupun manajerial. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui pembinaan pegawai baik berupa diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III mulai tahun 2017 Diklat Prajabatan berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon PNS Golongan III.

Pada tahun 2019, Pusdiklat BPS telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III. Selama diklat berlangsung, penyelenggara melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta yang mencakup aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Klasifikasi peserta berdasarkan predikat kelulusan adalah sangat memuaskan dengan nilai lebih dari 90,1; memuaskan dengan nilai 80,1-90; cukup memuaskan dengan nilai 70,1-80; kurang memuaskan dengan nilai 60,1-70; dan tidak memuaskan (tidak lulus) dengan nilai kurang dari 60.

Berdasarkan pencapaian nilai peserta, tingkat capaian kinerja pada indikator persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan telah melebihi target yang diharapkan yaitu mencapai 105,26 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 100 persen dibandingkan target PK 2019 sebesar 95 persen. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil yang sangat memuaskan.

Angka kelulusan yang telah melebihi target menunjukkan bahwa peserta diklat kepemimpinan III dan IV telah berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di

tempat asal dengan mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III mereka telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing. Capaian kinerja yang cukup tinggi juga tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat, yaitu pimpinan/pejabat struktural, widyaiswara/pengajar, dan seluruh staf Pusdiklat BPS. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 97 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 3,09 persen (Tabel 6). Begitu pula bila dilihat dari realisasi periode Renstra 2015-2019 bahwa realisasinya semakin meningkat.

Informasi mengenai Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat Kepemimpinan yang telah diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

1.1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)

Latsar CPNS merupakan salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

1.1.1. Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan jenis diklat secara umum adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan. Latsar CPNS merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Pelatihan ini dilaksanakan untuk menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.



Gambar 5. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Pada tahun 2019, Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II. Berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian 21 hari kerja atau setara dengan 191 JP untuk pembelajaran klasikal dan 30 hari kerja atau setara dengan 320 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habitiasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis administratif dan Kompetensi teknis substantif.

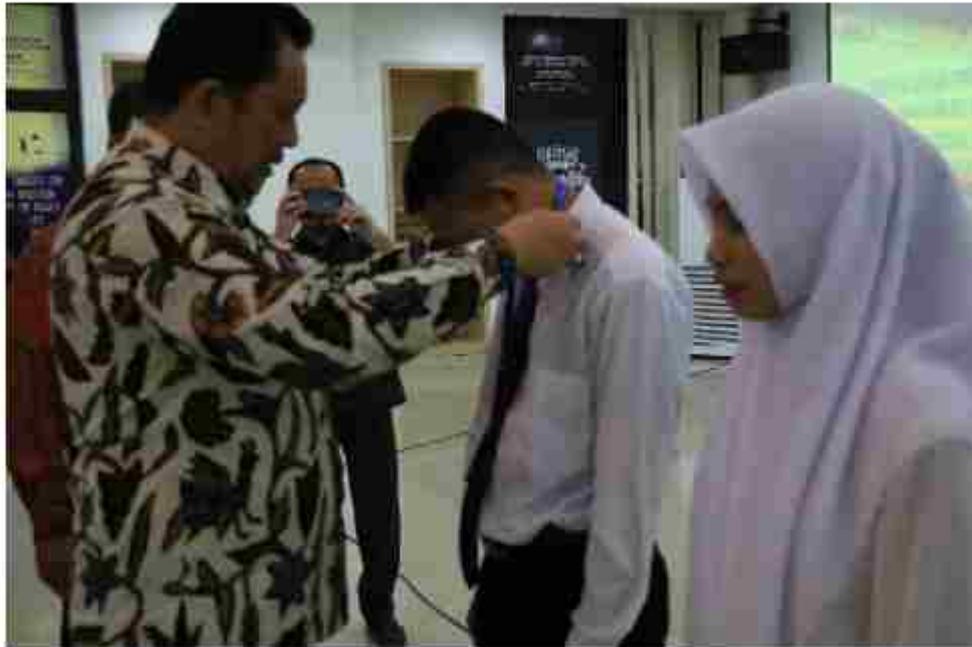


Gambar 6. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan II

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan II ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi, dan seminar. Pada tahun 2019 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II sebanyak 2 angkatan (1 *batch*) yaitu Angkatan I s.d. II dengan peserta sebanyak 71 orang. Pelaksanaan Latsar CPNS Golongan II BPS bersamaan dengan CPNS yang berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebanyak 3 orang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 15 orang, dan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) sebanyak 46 orang.

1.1.2. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan jenis diklat secara umum adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan. Latsar CPNS merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Pelatihan ini dilaksanakan untuk menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.



Gambar 7. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Pada tahun 2019, Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian 21 hari kerja atau setara dengan 191 JP untuk pembelajaran klasikal dan 30 hari kerja atau setara dengan 320 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habitiasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis administratif dan Kompetensi teknis substantif.

Pada minggu kedua Januari 2019 dilaksanakan seminar akhir evaluasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XVII s.d. XXIV. Latsar tersebut diselenggarakan di Tahun 2018. Akan tetapi, dengan keterbatasan waktu dan akomodasi yang ada di Pusdiklat maka pelaksanaan seminar akhir Latsar CPNS Golongan III Angkatan XVII s.d. XXIV (*Batch* 3 s.d. 6) dengan jumlah peserta sebanyak 293 orang baru bisa dilaksanakan pada Bulan Januari 2019.



Gambar 8. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi, dan seminar. Pada tahun 2019 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III sebanyak 22 angkatan (11 *batch*) yaitu Angkatan XXV s.d. XLVI dengan peserta sebanyak 814 orang.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS Golongan III, yaitu terdapat peserta yang sakit sehingga harus pindah ke angkatan selanjutnya. Selain itu, terdapat peserta yang hamil dimana masa aktualisasinya bersamaan dengan masa cuti melahirkan sehingga yang bersangkutan harus melaksanakan masa aktualisasi dan seminar aktualisasinya bersamaan dengan Latsar *batch* terakhir. Hal ini dikarenakan, berdasarkan ketentuan UU ASN yang menyebutkan bahwa masa percobaan CPNS adalah 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi CPNS.

1.2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bertujuan membentuk moral, kompetensi, dan sikap PNS untuk menduduki jabatan eselon tertentu. Pada tahun 2019, Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV dan tingkat III.

1.2.1. Diklatpim Tingkat IV

Diklatpim tingkat IV bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 9. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV mulai tahun 2014 ini dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistem "On Campus dan Off Campus". Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara "On Campus" selama 11 hari. Tahap 2 adalah tahap "Taking Ownership" atau *Breakthrough 1* yang dilaksanakan secara "Off Campus" selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 17 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang merupakan *Breakthrough 2* atau *Leadership Laboratory* atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara "On

Campus di Pusdiklat atau di Ibukota Provinsi asal peserta. Pada tahun anggaran 2019, BPS bekerja sama dengan LAN RI telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 3 angkatan yaitu Angkatan ke-108 sampai dengan Angkatan ke-110 dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang.



Gambar 10. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV

1.2.2. Diklatpim Tingkat III

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 11. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Seperti halnya Diklatpim Tingkat IV, pelaksanaan Diklatpim Tingkat III mulai tahun 2014 ini dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistem "On Campus dan Off Campus". Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara "On Campus" selama 10 hari. Tahap 2 adalah tahap "Taking Ownership" atau *Breakthrough 1* yang dilaksanakan secara "Off Campus" selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 15 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang merupakan *Breakthrough 2* atau *Leadership Laboratory* atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan untuk kedua Diklatpim masing-masing selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara "On Campus" di Pusdiklat atau di Ibukota Provinsi asal peserta. Pada tahun anggaran 2019, BPS bekerja sama dengan LAN RI telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 1 angkatan yaitu Angkatan ke-36 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.



Gambar 12. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III

1.2.3. Diklatpim Tingkat II

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, PNS pemangku jabatan struktural eselon II memerlukan standar kompetensi jabatan yang meliputi kompetensi dasar (integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, fleksibilitas) dan sejumlah kompetensi bidang lainnya.

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi untuk Diklatpim Tingkat II, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Pusdiklat BPS memberikan biaya penyelenggaraannya dan memfasilitasi biaya perjalanan peserta BPS. Pada tahun 2019, peserta Diklatpim Tingkat II dari BPS mengikuti diklat di LAN RI Jakarta sebanyak 2 orang, di LAN Makassar sebanyak 1 orang, di BPSDMD Jawa Tengah sebanyak 2 orang, dan BPSDMD Jawa Timur sebanyak 1 orang. Diklatpim Tk. II dilaksanakan selama 405 jam pelatihan (@45 menit) atau 135 sesi, dan peserta diasramakan. Selain itu dikirim pula sebanyak 3 orang untuk mengikuti Diklatpim Tingkat I di LAN RI Jakarta. Untuk Diklatpim Tingkat I, Pusdiklat BPS hanya memfasilitasi biaya perjalanannya.

2. IKU 2 : Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang Lulus dengan Kategori Baik

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis. Oleh karena itu, peran Pusdiklat BPS bersama unit kerja teknis terkait sangat dibutuhkan dalam merancang jenis diklat teknis substansi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis.

Pusdiklat BPS menyelenggarakan juga Diklat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional baik untuk pegawai BPS ataupun untuk pegawai Kementerian/Lembaga lain.

Pada diklat teknis dan fungsional, penentuan kelulusan peserta dilakukan melalui beberapa kategori yaitu kategori sangat memuaskan, memuaskan, baik sekali, dan baik. Unsur-unsur yang menjadi penilaian kelulusan peserta diklat teknis dan fungsional mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penguasaan materi yang dilihat berdasarkan nilai ujian tertulis dan praktikum
2. Penyusunan kertas kerja perorangan/kelompok
3. Nilai-nilai etika PNS seperti disiplin, prakarsa, dan kerja sama kelompok selama kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh nilai kelulusan peserta yang minimal berkategori baik. Tabel 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hasil capaian kinerja dari indikator persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik telah melampaui target yaitu sebesar 109,05 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sebesar 103,6 persen terhadap target PK 2019 sebesar 95 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 98,87 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 4,78 persen.

Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa peserta telah dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan dengan baik. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari performance (penampilan, teknik mengajar, dan buku modul yang menunjang) para pengajar/widyaiswara yang telah memberikan materi dengan baik sehingga dapat diserap oleh seluruh peserta diklat.

2.1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan BPS adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional pada Pusdiklat BPS pada tahun 2019 melaksanakan 24 (dua puluh empat) kegiatan diklat yang terdiri dari Diklat Fungsional sebanyak 5 (lima) diklat, Diklat Teknis sebanyak 7 (tujuh) diklat, Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 9 (sembilan) diklat serta Diklat Bendaharawan sebanyak 3 (tiga) diklat. Total Peserta yang dilatih adalah sebanyak 668 orang. Penjelasan laporan kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

2.1.1. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

Diklat fungsional statistisi tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2019.

Pada tahun 2019 diklat ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli dilaksanakan pada tanggal 30 September - 30 Oktober 2019 di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta, dengan jumlah peserta 22 orang, yang terdiri dari 16 laki-laki dan 6 perempuan. Ada sebanyak 17 peserta berasal dari BPS yang merupakan perwakilan dari BPS Pusat maupun BPS Provinsi dan sisanya 5 orang peserta non BPS yakni dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten di bidang masing-masing. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Dari hasil evaluasi nilai memperlihatkan bahwa rata-rata nilai ujian seluruh peserta diklat sebesar 84,6 dengan nilai tertinggi 88,08 dan nilai terendah 77,93. Seluruh peserta Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Tahun 2019 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



2.1.2. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

Selain diklat fungsional statistisi, Pusdiklat BPS pada tahun 2019 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2019.

Adapun pelaksanaan diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu pada tanggal 28 Oktober - 28 November 2019, yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta ada sebanyak 25 orang, terdiri dari 21 laki-laki dan 4 perempuan. Sebanyak 9 orang peserta berasal dari BPS Provinsi dan sisanya 16 orang peserta non BPS yakni berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Universitas Jenderal Soedirman, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara, Dit. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten dibidang komputer. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Dari hasil evaluasi nilai memperlihatkan bahwa rata-rata nilai ujian seluruh peserta diklat sebesar 83,07 dengan nilai tertinggi 85,59 dan nilai terendah 80,17. Seluruh peserta Diklat Pranata Komputer Tingkat Ahli Angkatan XIV Tahun 2019 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 14. Kegiatan Olahraga Pagi Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

2.1.3. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (PNBP)

Selain diklat fungsional statistisi, Pusdiklat BPS pada tahun 2019 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli PNBP. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara

diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan di luar BPS yaitu dari Kementerian Keuangan RI yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Kegiatan diklat ini dilaksanakan dengan mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2019.

Adapun pelaksanaan diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli PNBP yaitu pada tanggal 24 Juni - 2 Agustus 2019, yang bertempat di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat. Jumlah peserta ada sebanyak 20 orang, terdiri dari 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang berkompeten dibidang komputer. Evaluasi terhadap peserta diklat adalah evaluasi nilai yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Hasil evaluasi nilai memperlihatkan rata-rata nilai seluruh peserta sebesar 84,67 dengan nilai tertinggi 86,71 dan nilai terendah 80,40. Dari persyaratan nilai yang ditentukan, seluruh peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Tahun 2019 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan.



Ahli (PNBP)

2.1.4. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP)

Selain diklat fungsional prakom ahli, Pusdiklat BPS pada tahun 2019 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan I dan Angkatan II. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan di luar BPS yaitu dari Kementerian Keuangan RI dan Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Tingkat Terampil. Kegiatan diklat ini dilaksanakan dengan mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2019.

Adapun pelaksanaan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan I pada tanggal 14 Januari - 27 Februari 2019 dan Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus - 27 September 2019 yang bertempat di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat. Jumlah peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan I dan Angkatan II masing-masing sebanyak 19 dan 26 orang, yang terdiri dari 39 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari Kementerian Keuangan RI dan Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau.

Evaluasi nilai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur penilaian sesuai dengan bobotnya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam lampiran. Hasil evaluasi nilai Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan I memperlihatkan rata-rata nilai seluruh peserta sebesar 82,81 dengan nilai tertinggi 84,45 dan nilai terendah 79,55. Dari persyaratan nilai yang ditentukan, seluruh peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil Angkatan I Tahun 2019 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan. Sedangkan hasil evaluasi nilai Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP Angkatan II memperlihatkan rata-rata nilai seluruh peserta sebesar 84,35 dengan nilai tertinggi 88,00 dan nilai terendah 71,54. Dengan demikian, seluruh peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil Angkatan II Tahun 2019 dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan.



Gambar 16. Suasana Pembelajaran Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP)

2.1.5. Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Pada Tahun 2019 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Angkatan III Tahun 2019. Diklat ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman Pegawai BPS dalam melakukan penyusunan KTI sesuai dengan teknik-teknik yang tepat dan baik serta dapat menghindari praktek-praktek plagiarisme. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2019.

Adapun pelaksanaan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Angkatan III pada tanggal 4 - 7 November 2019 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Angkatan III sebanyak 35 orang peserta yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari BPS Daerah dan BPS Pusat. Pengajar dalam diklat ini adalah widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten.

Evaluasi dilakukan melalui teknik observasi selama pembelajaran berlangsung serta melalui teknis tes/angket yang dilakukan pada akhir sebuah mata diklat. Evaluasi lainnya

adalah Evaluasi Akhir dilakukan pada hari terakhir kegiatan diklat. Bentuk evaluasi akhir pada Diklat KTI ini adalah berupa kegiatan pengiriman naskah KTI ke salah satu jurnal ilmiah. Evaluasi akhir ini memiliki bobot nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan evaluasi mata diklat. Seluruh peserta Diklat Penulisan KTI Tahun 2019 berhasil mengirimkan naskah KTI ke jurnal ilmiah dan seluruhnya dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.



Gambar 17. Pembukaan dalam rangka Diklat Penulisan KTI

2.1.6. Diklat Teknis Substantif Komputer

Dalam rangka menunjang penerapan big data di BPS tersebut diperlukan SDM yang kompeten yaitu data scientist atau data analyze di mana salah satu tugasnya adalah melakukan analisis data (*data analytics*). Idealnya, seorang data scientist atau data analyze harus memiliki keahlian matematik, statistik, database, programming, dan visualisasi. Untuk itu, diperlukan pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan data scientist di BPS. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis substansi komputer yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai BPS baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya yang bertugas menganalisis data-data statistik sehingga dapat menganalisis big data terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjanya. Pelatihan dimaksud adalah Analisis Big Data dengan R. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2019.

Diklat Analisis Big Data dengan R Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 25 Februari - 1 Maret 2019, di Gedung Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Jakarta Selatan. Kemudian

Diklat Analisis Big Data dengan R Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 Oktober 2019. Jumlah peserta Diklat Teknis Komputer (Analisis Big Data dengan R) Angkatan I dan II masing-masing sebanyak 38 orang dan 27 orang peserta, yang terdiri dari 58 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Peserta diklat berasal dari BPS Pusat dan BPS Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa seluruh peserta mendapatkan sertifikat "Telah Mengikuti" diklat.



Gambar 18. Seminar Kertas Kerja Kelompok Diklat Teknis Substantif Komputer

2.1.7. Diklat Statistik Sektoral

Pada Tahun 2019 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Statistik Sektoral Angkatan I – IV. Diklat ini ditujukan bagi para wali data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dan pegawai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk "memperkenalkan" kepada peserta mengenai rencana Implementasi Statistik Nasional di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bidang Statistik, meliputi pembahasan materi RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kongruen (PUPK) sebagai dasar alur kerja yang dijalankan ketika menganalisis data-data sektoral. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2019.

Adapun pelaksanaan Diklat Statistik Sektoral Angkatan I – IV, yakni Angkatan I – II dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 November 2019 dan Angkatan III – IV tanggal 25 – 29 November 2019 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung,

Jakarta. Jumlah peserta Angkatan I – II sebanyak 66 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Umumnya peserta diklat berasal dari BPS Provinsi dan Diskominfo daerah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah peserta Angkatan III – IV sebanyak 53 orang, terdiri dari 33 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Umumnya peserta diklat berasal dari BPS Provinsi dan Diskominfo daerah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural, fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat atau praktisi yang berkompeten di bidang statistik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa seluruh peserta mendapatkan sertifikat "Telah Mengikuti" diklat.



Gambar 19. Kegiatan Pembelajaran Diklat Statistisk Sektoral

3. IKU 3 : Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus

Dalam rangka Standarisasi dan Sertifikasi bagi pegawai BPS, pada tahun 2019 dilakukan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Okupasi dan Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Sertifikasi Bendahara Pengeluaran. Selain itu, untuk mendukung tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pusdiklat juga menyelenggarakan Diklat Teknis Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan Pelatihan Unit Kompetensi Tertentu bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada sasaran strategis pertama, untuk mengukur kinerja standarisasi dan sertifikasi diwakili oleh indikator Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus. Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja dari indikator tersebut adalah sebesar 109,52 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sebesar 87,62 persen terhadap target PK 2019 sebesar 80 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 86,14 terdapat kenaikan sebesar 1,72 persen. Namun demikian, realisasi indikator Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus pada tahun 2018 masih gabung dengan indikator Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus.

3.1. Standarisasi dan Sertifikasi

3.1.1. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tahun 2019 pusdiklat menyelenggarakan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi terdiri dari 3 angkatan yaitu angkatan XXVIII – XXX yang merupakan hasil kerja sama dengan LKPP. Tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika.

Kegiatan diklat ini diikuti oleh pegawai BPS yang akan ditunjuk sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XXVIII dilaksanakan pada tanggal 11 – 15 Februari 2019. Selanjutnya, Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XXIX dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Februari 2019. Untuk Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XXX diselenggarakan pada tanggal 18 – 22 Maret 2019.

Pengajar diklat berasal dari berbagai instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat mengajar dari LKPP. Setelah tahap pelatihan selesai dilanjutkan dengan ujian sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah bagi yang lulus. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara online di laboratorium komputer pusdiklat lantai 3. Adapun berdasarkan hasil ujian sertifikasi tingkat kelulusan peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi 3 angkatan pada tahun 2019 sebesar 87,62 persen atau sejumlah 92 orang dari 105 orang peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi 3 angkatan.



Gambar 20. Kegiatan Ujian Sertifikasi Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.1.2. Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada tahun 2019, Pusdiklat menyelenggarakan Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bermaksud menghasilkan Pengelola PBJ dalam hal ini adalah PPK yang kompeten pada unit-unit kompetensi pada Jabatan Organisasi (Okupasi) PBJ. Dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023. Diklat Okupasi PPK diselenggarakan dengan model pembelajaran Blended Learning terdiri dari pembelajaran mandiri di tempat tugas masing-masing secara e-Teaming dan dilanjutkan tatap muka (klasikal) di kelas. Dilanjutkan dengan ujian sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi.

Keluaran dari diklat ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan Kompetensi tertentu sebanyak 15 UK yang di tunjukkan dengan adanya sertifikat kelulusan yang diberikan setelah pelatihan.

Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus - 22 Oktober 2019, yang bertempat di Gedung Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta ada sebanyak 15 orang, terdiri dari 12 orang laki-

laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober - 30 November 2019, yang bertempat di The Margo Hotel Jl. Margonda Raya No. 358, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Jumlah peserta ada sebanyak 24 orang, terdiri dari 21 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Keseluruhan peserta diklat ini berasal dari BPS Pusat dan BPS Daerah.

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural, fungsional Pusdiklat PBJ LKPP atau dosen/praktisi yang berkompeten dibidang pengadaan barang/jasa (atau jika diklat PBJP LKPP pengajar yang berasal dari berbagai instansi pemerintah/swasta yang telah memiliki sertifikat mengajar (ToT) dan mendapat rekomendasi dari LKPP).

Evaluasi nilai dilakukan dengan mengikuti ujian sertifikasi setiap Unit Kompetensi (UK) yang dilakukan oleh assessor yang direkomendasikan oleh LKPP, Peserta yang telah mengikuti diklat akan mendapatkan sertifikat tanda kelulusan untuk setiap Unit Kompetensi (UK).

Berdasarkan hasil ujian sertifikasi PPK tahun 2019 yang diselenggarakan oleh LKPP, dari 39 orang peserta ujian yang dinyatakan lulus dan Kompeten untuk semua unit kompetensi hanya sebanyak 7 orang, sedangkan 32 orang lainnya belum kompeten.



Gambar 21. Kegiatan Pembelajaran Klasikal Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen

3.1.3. Diklat Teknis Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Adapun dalam memenuhi standar kompetensi sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada

satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pusdiklat menyelenggarakan Diklat Teknis Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Diklat Teknis Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 21 - 23 Januari 2019 untuk Angkatan I dan 23 - 26 Januari 2019 untuk Angkatan II, yang bertempat di Gedung Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jumlah peserta ada sebanyak 70 orang, terdiri dari 50 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Umumnya peserta diklat berasal dari BPS Pusat dan BPS Provinsi.

Pengajar dalam diklat ini adalah para pejabat struktural dari Biro Keuangan BPS dan pengajar yang berasal dari berbagai instansi pemerintah/swasta yang telah memiliki sertifikat mengajar (ToT) dan mendapat rekomendasi dari LKPP.

Seluruh peserta Diklat Teknis Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 berhak mendapatkan sertifikat telah mengikuti. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 22. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Diklat Teknis Pelaku PBJ

3.1.4. Pelatihan Unit Kompetensi Bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Guna mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta semakin meningkatnya kompleksitas pengadaan barang/jasa, maka PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan harus memiliki beberapa kompetensi dan disadari

betul bahwa kompetensi tersebut hanya didapat berdasarkan learning by doing. Oleh karena itu agar PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dapat bekerja lebih profesional, maka Pusdiklat menyelenggarakan pelatihan unit kompetensi kepada PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

Pelatihan Unit Kompetensi Bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 13 - 17 Mei 2019, yang bertempat di Gedung Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jumlah peserta ada sebanyak 40 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.

Pengajar dalam diklat ini adalah pengajar yang berasal dari berbagai instansi pemerintah/swasta yang telah memiliki sertifikat mengajar (ToT) dan mendapat rekomendasi dari LKPP.

Seluruh peserta Pelatihan Unit Kompetensi Tertentu bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Pusat Statistik Angkatan I dan II Tahun 2019 berhak mendapatkan sertifikat telah mengikuti. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 23. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Pelatihan Unit Kompetensi Bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. IKU 4 : Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus

4.1. Sertifikasi Bendahara Pengeluaran

Untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam pengurusan keuangan negara adalah dengan melaksanakan Kursus Bendaharawan. Dan untuk mempersiapkan tenaga Bendaharawan dan calon Bendaharawan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia

dan BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten/Kota, maka dalam tahun 2019 BPS bekerjasama kembali dengan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran Departemen Keuangan untuk melaksanakan Kursus Bendaharawan.

Maksud kegiatan ini adalah untuk menghasilkan bendaharawan bersertifikat yang memenuhi persyaratan, terampil dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengurus uang negara yang dikelolanya serta menciptakan kesatuan pengertian dan kesatuan bahasa dalam pengurusan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas di bidang kebendaharaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tujuan kegiatan ini adalah untuk terwujudnya administrasi keuangan tingkat kementerian/lembaga yang baik, akurat dan sesuai dengan standar peraturan keuangan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019, maka pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa indikator Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus sudah terpisah dengan indikator Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, indikator Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus masih gabung dengan indikator Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus sehingga untuk tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018.

Pusdiklat BPS menyelenggarakan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Angkatan V – VI. Sertifikasi Bendahara Pengeluaran ini diikuti oleh Pegawai BPS yang merupakan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang saat ini masih menjabat. Sedangkan bagi Pegawai BPS yang belum menjabat sebagai bendahara pengeluaran, akan tetapi dicalonkan sebagai bendahara pengeluaran maka Pusdiklat menyelenggarakan Kursus Bendaharawan.

Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Angkatan V – VI dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Juni 2019 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa 70, Lenteng Agung, Jakarta. Sebelum pelaksanaan ujian sertifikasi, diadakan refreshing bagi Bendahara Pengeluaran yang disampaikan oleh Pengajar dari BPS Pusat dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara *online* di laboratorium komputer pusdiklat lantai 3. Adapun berdasarkan hasil ujian sertifikasi tingkat kelulusan peserta Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Angkatan V – VI pada tahun 2019, keseluruhan peserta dinyatakan LULUS.

Kursus Bendaharawan dilaksanakan pada tanggal 18 - 22 November 2019, yang bertempat di Gedung Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Adapun jumlah peserta ada sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 22

orang perempuan. Seluruh peserta diklat berasal dari BPS, dengan rincian yaitu 1 orang berasal dari Pusdiklat BPS dan 34 BPS Provinsi.

Pengajar dalam diklat ini berasal dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sedangkan evaluasi nilai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur penilaian sesuai persyaratan nilai yang ditentukan dalam aturan pedoman penyelenggaraan diklat. Peserta yang berhak mengikuti ujian sertifikasi bendahara adalah peserta yang lulus ujian pelatihan (nilai minimal komprehensif adalah 60). Ujian sertifikasi bendahara mengikuti aturan dari DPJB. Seluruh peserta Kursus Bendaharawan yang dinyatakan lulus pelatihan sebanyak 31 orang dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Dari 31 orang yang lulus pelatihan dan berhak mengikuti ujian sertifikasi sebanyak 28 orang yang dinyatakan Lulus Sertifikasi dan berhak mendapatkan sertifikat sertifikasi bendahara dari DPJB.



Gambar 24. Kegiatan Ujian Sertifikasi Kursus Bendaharawan

5. IKU 5 : Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara penyelenggara, peserta diklat, dan pengajar/widyaiswara. Dalam upaya pelaksanaan diklat yang lebih baik dan peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, perlu diketahui seberapa jauh kemampuan para peserta dalam menyerap materi, kemampuan dan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara terhadap materi yang diberikan di kelas, serta pelayanan

penyelenggara dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan penyelenggara terhadap kegiatan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPS, peserta diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan melalui saran-saran dan komentar. Penyelenggaraan diklat yang dievaluasi meliputi fasilitas akomodasi, konsumsi, dan penyelenggara. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Kepuasan peserta diklat merupakan salah satu yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk memenuhi sasaran terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Tinggi rendahnya capaian kinerja yang diperoleh menjadi salah satu acuan bagi Pusdiklat BPS agar dapat meningkatkan mutu pelayanan diklat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat melalui besarnya realisasi terhadap target PK 2019. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat adalah sebesar 93,11 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 85,2 persen dibandingkan target PK 2019 sebesar 91,50 persen. Target PK pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat merupakan rata-rata antara target PK pada Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dan Bidang Diklat Teknis dan Fungsional. Tingkat capaian yang diperoleh sedikit lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan namun hampir mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 89,51 persen, maka terjadi penurunan sebesar 4,82 persen.

Angka capaian 93,11 persen sudah relatif menunjukkan ke arah yang lebih baik. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan berdasarkan masukan dari peserta. Peserta memberi masukan baik melalui angket pada periode tertentu maupun melalui masukan sewaktu-waktu terkait penyelenggaraan diklat.

Di sisi lain, evaluasi penyelenggaraan dilakukan terhadap widyaiswara/pengajar yang terlibat langsung terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pengisian angket yang berisi penilaian peserta diklat terhadap pengajar diperoleh kesimpulan bahwa widyaiswara/pengajar dapat menyampaikan materi dengan baik, dengan nilai rata-rata 90,65.

Secara umum proses pembelajaran sudah ke arah lebih baik, terutama pada diklat prajabatan dan diklatpim. Dengan adanya pelaksanaan diklat melalui pola baru, peserta

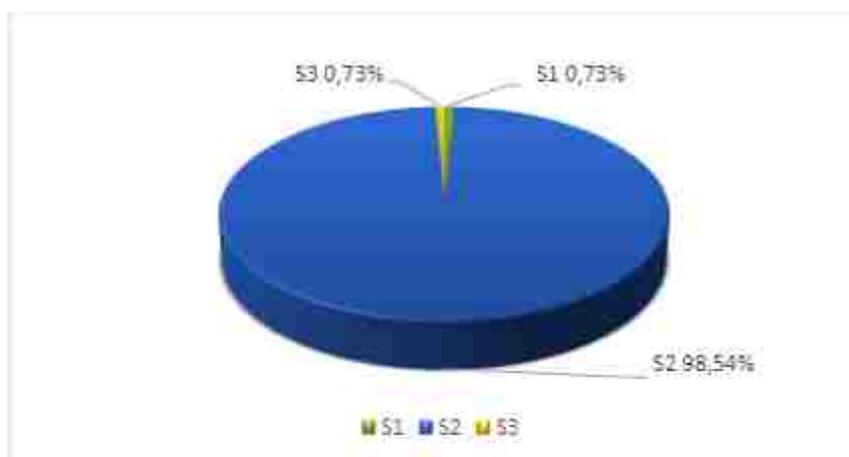
merasa lebih menyukai pola baru tersebut karena materi yang dipelajari dapat diaplikasikan langsung di tempat tugas masing-masing melalui aktualisasi bagi diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi diklatpim.

Untuk menunjang kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat, telah dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas seperti kamar asrama, kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya melalui pemeliharaan bangunan dan gedung. Untuk meningkatkan sarana diklat di bidang kesehatan dan hiburan, Pusdiklat BPS menyediakan fasilitas alat-alat fitness, kursi pijat elektrik, dan alat musik karaoke yang berada di ruang khusus di gedung basement. Sarana tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas peserta sebagai penunjang kesehatan dan hiburan di sela-sela kesibukan mengikuti diklat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan sarana prasarana diklat tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

6. IKU 6 : Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan

PNS yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas sebagai aparatur negara, dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri melalui jalur Izin Belajar (IB). Pusdiklat BPS sebagai pengelola IB melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian IB dan mengadministrasikannya bagi pegawai BPS yang ingin melanjutkan sekolah melalui jalur IB. Seluruh IB program S2 dan S3 diproses oleh Pusdiklat dengan mendapat rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Utama (Sestama). Sementara itu untuk pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang S1, bagi pegawai BPS Pusat surat IB-nya dibuat oleh Pusdiklat sedangkan bagi pegawai BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh Kepala BPS Provinsi yang ditembuskan ke Pusdiklat dan Biro Kepegawaian.

Persentase penyelesaian Surat Izin Belajar yang dilakukan Pusdiklat BPS pada jenjang pendidikan D3/S1, S2 dan S3 dapat dilihat pada Gambar 24. Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan oleh Pusdiklat BPS sebagian besar pada jenjang pendidikan S2 sebesar 98,54 persen. Sementara itu, untuk S1 dan S3 masing-masing sebesar 0,73 persen.



Gambar 25. Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3, Tahun 2019

Penyelesaian surat izin belajar menjadi salah satu indikator capaian kinerja dalam rangka terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Pada Tabel 7 ditunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk surat izin belajar yang diselesaikan pada tahun 2019 sesuai dengan target PK 2019 yaitu 100 persen. Bila dilihat periode Renstra tahun 2015-2019, angka tersebut konstan sebesar 100 persen.

Capaian kinerja yang sesuai harapan tersebut menunjukkan kinerja Pusdiklat BPS yang cukup berhasil dalam mewujudkan layanan diklat sekaligus untuk peningkatan dan pengembangan SDM pegawai BPS yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.

6. IKU 6 : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS

Selain mengelola izin belajar, Pusdiklat BPS mempunyai tugas menyelenggarakan program Tugas Belajar (TB). Program tersebut dilakukan Pusdiklat BPS dengan kegiatan mengirim dan mengelola TB bagi pegawai BPS baik ke dalam maupun ke luar negeri. Program TB yang dimaksud di sini mencakup untuk program pendidikan gelar S2 dan S3, sehingga tidak ada untuk program pendidikan non gelar (*short course* dan *post doctoral*). Dari sisi pembiayaan, program TB yang diselenggarakan oleh Pusdiklat terdiri dari:

1. Beasiswa APBN BPS

Program ini adalah kerjasama rintisan gelar S2 maupun S3 antara BPS dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, ITS, UNAIR, dan UNDIP.

2. Beasiswa APBN Non BPS

Program ini berupa tawaran beasiswa dari Bappenas atau Kementerian/Lembaga lain baik untuk program S2 dalam negeri, luar negeri, maupun Double Degree dan S3.

3. Beasiswa Non APBN

Penyedia utama beasiswa non APBN adalah STUNED untuk studi di Belanda dan AAS untuk studi di Australia. Selain itu terdapat pula beberapa negara sponsor beasiswa seperti Jepang, Jerman, Belanda, dan Swiss namun tidak ditawarkan setiap tahun.

4. Individu pegawai juga dapat mencari sendiri sponsor beasiswa. Setelah mendapat izin dari atasannya (Eselon II), maka dapat diajukan ke Pusdiklat untuk mendapatkan status TB dengan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar (SPTB) dan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB) dari Biro Kepegawaian.

Pelaksanaan program TB Rintisan Gelar (APBN) didahului adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara BPS dengan Universitas/Perguruan Tinggi (Univ/PT), yang dilanjutkan dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama setiap akan mengirim calon mahasiswa baru. Pusdiklat BPS juga menyusun dan mengajukan rencana biaya pendidikan, tunjangan hidup, buku, dan riset peserta Tugas Belajar APBN dan merencanakan jumlah pegawai yang akan ditugaskanbelajarkan.

Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat BPS untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program beasiswa APBN BPS yang selama ini berjalan meliputi program studi ilmu statistik, ekonomi, kependudukan, dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan ilmu lainnya dalam menunjang pekerjaan BPS maka pada tahun 2019 ditambahkan program studi Ilmu Akuntansi dan Ilmu Psikologi. Dari program-program tersebut diharapkan dapat menyiapkan calon-calon pimpinan BPS yang akan menduduki jabatan struktural BPS baik di pusat maupun daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional seperti fungsional pranata komputer, statistisi, peneliti, widyaiswara, dosen, dan sebagainya.



Gambar 26. Wisuda Peserta TB APBN BPS S2 UGM MKK Tahun 2019



Gambar 27. Workshop Pengelolaan Beasiswa TB dan Apresiasi Mitra Pemberi Beasiswa Tahun 2019



Gambar 28. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama TB S2 Unair Tahun 2019



Gambar 29. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Unhas dan BPS RI Tahun 2019

Tabel 7. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2019

No	Program Beasiswa	Sponsor				Jumlah Tugas Belajar
		APBN BPS	Non BPS			
			Dalam Negeri	Luar Negeri	Double Degree	
1	S2	115	27	16	17	175
2	S3	3	-	5	-	8
Jumlah		118	27	21	17	183

Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai APBN BPS pada tahun 2019 adalah sebanyak 118 orang (Tabel 7). Mereka tersebar di beberapa perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) program studi Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad) program studi Statistika, Universitas Indonesia (UI) program studi ketenagakerjaan, ekonomi, dan psikologi, Universitas Gadjah Mada (UGM) program studi Ekonomi dan Kependudukan, Universitas Airlangga (Unair) program studi ekonomi, Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi Statistika, dan Universitas Diponegoro (Undip) program studi akuntansi. Selain dari APBN BPS terdapat pegawai yang memperoleh beasiswa dari Non BPS baik dalam negeri, luar negeri maupun double degree sebanyak 65 orang.

Pada tahun 2019 jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS ditargetkan sebanyak 119 orang, namun realisasi sebanyak 118 orang sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,16 persen. Hal tersebut disebabkan karena pascasarjana S3 ITB tidak ada yang mendaftar sehingga yang awalnya disediakan kuota untuk satu peserta menjadi ditiadakan. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS pada tahun 2019 ternyata sama dengan tahun 2018 yaitu 118 orang.

Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator di atas menunjukkan bahwa peserta TB pada tahun 2019 tidak ada yang mengundurkan diri atau drop out sehingga perkuliahan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pelayanan Pusklat BPS yang berkinerja baik dalam menangani semua permasalahan penyelenggaraan TB baik dalam hal penanganan pemberian uang saku/biaya hidup, uang buku, uang riset, maupun biaya pendidikan. Selain itu pula kelancaran dalam hal penanganan peserta yang akan mengikuti ujian tesis baik penyediaan penguji maupun operasional lainnya.

Bila dilihat perbandingan realisasi selama periode Renstra tahun 2015-2019, jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS mengalami penurunan yaitu dari 242

orang pada tahun 2015, sebanyak 142 orang pada tahun 2016, sebanyak 121 orang pada tahun 2017, dan masing-masing 118 orang pada tahun 2018 dan 2019. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya efisiensi anggaran sehingga terjadi penurunan kuota peserta tugas belajar pada masing-masing universitas. Selain itu, karena SDM yang terbatas terjadi pula pengurangan pengusulan calon peserta tugas belajar dari Eselon II masing-masing baik BPS Provinsi maupun Pusat.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA YANG TRANSPARAN

Kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi pokok Pusdiklat BPS dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja yang transparan. Akuntabilitas kinerja yang transparan sangat diperlukan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan merupakan sasaran kedua dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS tahun 2018. Sasaran tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2019

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Realisasi 2018	Perubahan terhadap realisasi 2018 (%) $((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70	70,39	100,56	70,47	- 0,11
Rata rata Capaian Kinerja			100,56		

7. IKU : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat

semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Pusdiklat BPS sebagai salah satu unsur dari instansi pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima baik kepada pegawai BPS maupun instansi lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka penilaian SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdiklat BPS dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam evaluasi SAKIP komponen yang dinilai terdiri atas :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Masing-masing komponen tersebut terbagi lagi ke dalam evaluasi sub komponen:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Perencanaan Strategis
 - 1). Pemenuhan Renstra
 - 2). Kualitas Renstra
 - 3). Implementasi Renstra
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 1). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

- 2). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 3). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pemenuhan Pengukuran
 - b. Kualitas Pengukuran
 - c. Implementasi Pengukuran
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Pemenuhan Pelaporan
 - b. Kualitas Informasi Kinerja
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja
 4. Evaluasi Kinerja
 - a. Pemenuhan Evaluasi
 - b. Kualitas Evaluasi
 - c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
 - a. Kinerja Yang Dilaporkan (Output)
 - b. Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

Sebagai acuan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi realisasi penilaian SAKIP menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun 2019 adalah sebesar 70,39 poin sedangkan target PK 2019 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 100,56 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh telah melebihi dari target yang diharapkan. Angka ini sejalan dengan upaya Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun untuk selalu memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami sedikit penurunan poin sebesar 0,11 persen.

Dalam kurun waktu lima tahun periode Renstra 2015-2019, hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Pusdiklat BPS semakin baik yaitu dapat dilihat dari realisasinya pada tahun 2015 sebesar 58,54 poin meningkat menjadi 65,35 poin pada tahun 2016, kemudian menjadi sebesar 70,27 poin pada tahun 2017, dan 70,47 poin pada tahun 2018. Hanya terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019 yaitu 70,39 poin namun telah melebihi dari target yang ditetapkan.

3.3. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2015-2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pada periode Renstra 2015-2019. Berdasarkan Tabel 9, jika dibandingkan target Renstra tahun 2019, maka capaian indikator dari tujuan "Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima" belum mencapai hasil yang maksimal, yaitu diperoleh capaian terhadap target Renstra 2019 sebesar 88,75 persen. Bila dilihat dari target Renstra 2019 yang sebesar 96 persen, sedangkan realisasinya hanya mencapai 85,20 persen, perlu dilakukan analisa lebih dalam terhadap indikator tersebut sehingga proses perencanaan pada Renstra yang akan datang yaitu tahun 2020-2024 diperoleh target yang dapat mewakili kinerjanya bahkan berupaya untuk meningkatkan kinerja melebihi dari target yang diharapkan.

Indikator pertama yang terdapat pada Sasaran Strategis pertama tercatat bahwa realisasi persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan pada tahun 2019 sebesar 100 persen jauh lebih tinggi dibandingkan target Renstra tahun 2019 yaitu 94 persen. Begitu pula bila dilihat pada Tabel 10, bahwa realisasi indikator tersebut jauh melebihi dari target Renstra tahun-tahun sebelumnya. Dengan capaian diatas 100 persen diperlukan penajaman target pada Renstra 2020-2024 agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih tergambar.

Begitu pula pada capaian indikator kedua yaitu persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik telah berhasil melebihi target, yaitu dengan target Renstra 2019 sebesar 94 persen diperoleh realisasi sebesar 103,60 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 110,21 persen (Tabel 9). Begitu pula untuk tahun-tahun

sebelumnya seperti pada Tabel 10. Sama halnya dengan indikator pertama, perlu dilakukan pula penajaman target agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih tergambar.

Untuk capaian indikator ketiga Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus juga telah melebihi dari target Renstra 2019 yaitu dengan target Renstra 2019 sebesar 80 persen diperoleh realisasi sebesar 87,62 persen sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 109,52 persen. Bila dilihat Renstra untuk tahun-tahun sebelumnya (Tabel 10), indikator ini muncul mulai tahun 2017 dengan capaian juga telah melebihi target. Oleh karena itu perlu dilakukan pula penajaman target agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih tergambar.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2019

Tujuan/Sasaran/IKU	Satuan	Target Renstra 2019	Realisasi 2019	Capaian terhadap Target 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	96	85,20	88,75
SS1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	94	100,00	106,38
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	94	103,60	110,21
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	80	87,62	109,52
Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus	Persen	-	90,00	-
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	96	85,20	88,75
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100	100,00	100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	324	118	36,42
SS2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70	70,39	100,56

Capaian pada indikator keempat yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat belum dapat dikatakan berhasil dengan realisasi sebesar 85,20 persen. Angka tersebut relatif masih jauh dari target Renstra mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang angkanya berkisar mulai dari 90 persen hingga 96 persen seperti pada Tabel 10.

Sejalan dengan itu, untuk indikator persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat perlu digali informasi lebih dalam lagi agar dapat ditentukan target yang sesuai untuk Renstra Pusdiklat periode tahun 2020-2024. Selain itu perlu upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait agar di masa mendatang diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi mengingat indikator kepuasan peserta diklat dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan kegiatan diklat.

Pada indikator selanjutnya dari Sasaran Strategis (SS) 1 yaitu persentase surat izin belajar yang diselesaikan diperoleh capaian kinerja yang telah sesuai dengan Renstra tahun 2015-2019. Di sisi lain, capaian indikator jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS sangat jauh dari target Renstra tahun 2019. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 118 orang pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS, sedangkan target Renstra tahun 2019 adalah sebanyak 324 orang. Perbedaan jumlah tersebut juga terlihat dari tahun 2015-2018. Untuk itu dalam menentukan target indikator Renstra periode tahun 2020-2024 perlu digali informasi lebih dalam lagi pada proses perencanaan kegiatannya agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					Realisasi Kinerja Tahun 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Satuan Kerja: Pusdiklat BPS							
	SS.1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima						
	1.1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	91%	92%	93%	94%	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					Realisasi Kinerja Tahun 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	91%	92%	93%	94%	103,6%
	1.3. Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang lulus	-	-	80%	80%	80%	87,6%
	1.4. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	92%	94%	95%	96%	85,2%
	1.5. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.6. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Diblrayai BPS	242	265	280	320	324	118
	SS.2. Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan						
	2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75	70,39

3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2019

Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2019 adalah Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Diklat tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2019 yang diperuntukkan bagi calon pegawai lulusan STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) tahun 2018 dan calon pegawai penerimaan formasi umum baik golongan III maupun golongan II tahun 2018. Penempatan skala prioritas pada kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan II dilakukan untuk mengantisipasi terkait peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa percobaan Calon PNS yang hanya berlaku 1 (satu) tahun.

Pada tahun ini, kegiatan diklat teknis yang masih menjadi prioritas berkaitan dengan sertifikasi. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai dalam rangka penguatan administrasi keuangan BPS. Untuk itu Pusdiklat menyelenggarakan Diklat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Bendaharawan, Pelatihan Unit Kompetensi Tertentu bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Diklat Okupasi dan Sertifikasi PPK. Diklat yang juga menjadi prioritas adalah Pelatihan Statistik Sektoral yang pesertanya dari Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan BPS di setiap provinsi. Penguatan dalam bidang statistik sektoral dilaksanakan dalam rangka Satu Data Indonesia dan *National Strategic for Development of Statistic (NSDS)*.

3.5. Upaya Efisiensi

Upaya efisiensi yang telah dilakukan Pusdiklat BPS selama tahun 2019 adalah:

1. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-034/BPS/1000/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Efisiensi dalam rangka Pemenuhan Tunjangan Kinerja Tahun 2019, Pusdiklat melakukan **selfblocking** sebesar Rp 13.168.000,- dari sisa pengadaan kendaraan Eselon II dan pengadaan printer sehingga anggaran PSPA yang semula Rp 650.677.000,- menjadi Rp 637.509.000,-.
2. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor B-323/BPS/2000/09/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Revisi DIPA BPA TA 2019 yang berkaitan dengan pemenuhan kekurangan anggaran Belanja Pegawai di seluruh Satuan Kerja BPS, Pusdiklat melakukan **selfblocking** (pengurangan pagu anggaran) sebesar Rp. 646.925.000,- dengan melakukan efisiensi anggaran dari akun 51 (belanja pegawai) sebesar Rp. 77.000.000,-, akun 52 (belanja barang) sebesar Rp. 568.177.000,- dan akun 53 (belanja modal) sebesar Rp. 1.748.000.
3. Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan diklat, Pusdiklat BPS berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah pelaksanaan seminar evaluasi aktualisasi pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III. Untuk menghemat anggaran perjalanan maka lokasi seminar diadakan di daerah masing-masing peserta (setiap daerah terdiri dari maksimal 10 peserta diklat), kecuali peserta dari BPS Pusat dan sekitarnya diadakan di Pusdiklat BPS. Optimalisasi anggaran digunakan untuk kegiatan diklat lain terutama diklat teknis yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kinerja dan kualitas pegawai BPS.
4. Efisiensi penyelenggaraan diklat juga dilakukan pada saat kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada Latsar CPNS Golongan III dan seminar rancangan proyek perubahan pada Diklatpim Tingkat IV. Sesuai dengan kurikulum dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, bahwa seminar dihadiri oleh satu mentor per peserta. Untuk menghemat

- anggaran perjalanan maka satu provinsi yang terdiri dari beberapa peserta diklat (7 – 8 orang), hanya diwakili oleh satu mentor.
5. Efisiensi lainnya yang juga dilakukan pada penggunaan anggaran diklat adalah pemberian uang saku diklat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bahwa rate uang saku diklat di DKI Jakarta adalah sebesar Rp 160.000,- per orang hari namun untuk efisiensi hanya diberikan sebesar Rp 100.000,- per orang hari.
 6. Upaya efisiensi dilakukan juga pada biaya operasional perkantoran yaitu biaya langganan daya dan jasa listrik. Pada tahun 2019, dari anggaran yang semula disediakan sebesar Rp 840,00 juta digunakan sebesar Rp 719,27 juta. Efisiensi tersebut dilakukan melalui penghematan listrik baik untuk keperluan operasional perkantoran maupun kelas dan asrama (kamar peserta). Begitu pula pada biaya langganan telepon yang semula disediakan sebesar Rp 20,40 juta hanya digunakan sebesar Rp 4,8 juta.
 7. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 dari total pagu anggaran sebanyak Rp 68.649,82 juta direalisasikan anggaran sebanyak Rp 65.135,64 juta atau sekitar 94,88 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 93,11 persen dan capaian kinerja sasaran sebesar 103,65 persen, dapat dikatakan Pusdiklat BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran meskipun belum maksimal.

3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pagu Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang tertuang pada masing-masing indikator, diperlukan anggaran yang memadai sehingga tujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima dapat tercapai. Pada pagu anggaran Pusdiklat BPS, output maupun komponen/subkomponen belum sepenuhnya dapat menggambarkan secara rinci sasaran tersebut. Namun, beberapa subkomponen anggaran dapat sedikit menggambarkan indikator-indikator yang ada pada sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima seperti pada Tabel 11.

Tabel 11. Pagu Anggaran Menurut Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2019

IKU	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Pagu Anggaran 2019 (juta rupiah)	Persentase anggaran terhadap Output 966
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Output 966. Layanan Pendidikan dan Pelatihan				36.948,47	100,00
Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	95,00	100,00	105,26	30.998,42	83,90
Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	95,00	103,60	109,05	4.511,04	12,21
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	80,00	87,62	109,52	824,67	2,23
Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus	80,00	90,00	112,50	614,34	1,66
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	91,50	85,20	93,11	-	-
Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	-	-
Output 970. Layanan Dukungan Manajemen Satker				13.889,68	94,11
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	119	118	99,16	13.071,84	94,11

Tabel 11 menunjukkan bahwa pada Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat bahwa pagu terbesar disediakan untuk mewujudkan capaian kinerja indikator Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang Lulus dengan Kategori Memuaskan. Dari seluruh anggaran pada output Layanan Pendidikan dan Pelatihan, sebanyak 30.998,42 juta rupiah atau sebesar 83,90 persen disediakan untuk mendukung kegiatan pada indikator tersebut. Dengan dana yang cukup besar diharapkan dapat memenuhi kegiatan pengembangan kompetensi pegawai baik Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III maupun Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III, dan II. Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai BPS saja melainkan juga pegawai dari Kementerian/Lembaga lainnya dalam bentuk kerjasama PNBP. Pada tahun 2019, telah dilakukan Latsar Gol II untuk peserta dari Instansi Badan Keamanan Laut (Bakamla), LKPP, dan Pemda Bengkulu Utara serta Latsar Gol III dari Kementerian Sosial RI.

Sementara itu untuk memenuhi pencapaian kinerja pada indikator Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang Lulus dengan Kategori Baik, ditunjang dengan anggaran sebanyak 4.511,04 atau sebesar 12,21 persen. Diklat teknis yang telah dilaksanakan adalah Diklat Teknis Substantif Statistik berupa Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Pelatihan Bahasa Inggris, Diklat Teknis Substantif Komputer berupa Pelatihan Analisis Big Data dengan R. Diklat Fungsional yang telah dilaksanakan adalah Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli, Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil dan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, Pusdiklat BPS juga menyediakan diklat untuk Kementerian/Lembaga lainnya. Untuk Diklat Fungsional Pranata Komputer baik Tingkat Terampil maupun Ahli, Pusdiklat telah menyelenggarakan untuk pegawai Kementerian Keuangan dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam bentuk kerjasama PNBP.

Selanjutnya, untuk indikator Persentase Peserta Diklat Barang dan Jasa yang Lulus didukung dengan anggaran sebanyak 824,67 juta rupiah atau 2,23 persen. Dan untuk indikator Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus didukung dengan anggaran sebanyak 614,34 juta rupiah atau 1,66 persen.

Dalam rangka pengembangan pegawainya, BPS menyelenggarakan rintisan pendidikan gelar dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti tugas belajar di beberapa Universitas/Perguruan Tinggi program pascasarjana S2/S3 yang dananya berasal dari APBN BPS. Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut tertuang pada indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS. Anggaran yang disediakan untuk memenuhi capaian kinerja indikator tersebut cukup besar yaitu sebanyak 13.071,84 juta rupiah atau

94,11 persen dari anggaran yang terdapat pada Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Penggunaan anggaran tersebut untuk membayar biaya pendidikan seluruh peserta tugas belajar, bantuan biaya hidup per bulan, bantuan uang buku dan referensi per tahun, bantuan riset/penelitian/seminar per tahun, biaya perjalanan pemanggilan dan pemulangan peserta tugas belajar, dan biaya perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi.

Pagu Anggaran Menurut Program dan Sumber Dana

Selain dari sisi SDM, keberhasilan pencapaian kinerja sangat didukung oleh anggaran yang tersedia di Pusdiklat BPS. Dukungan dana tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTTL), dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Pusdiklat BPS beserta jajarannya atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada tahun 2019 dialokasikan pagu anggaran sebanyak Rp 68.649,82 juta. Pagu anggaran tersebut terdiri dari Program DMPTTL sebanyak Rp 68.014,06 juta yang terdiri dari Rp 66.250,77 juta berasal dari rupiah murni dan Rp 1.763,29 juta berasal dari PNBPN, serta Program PSPA sebanyak Rp 635,76 juta. Rincian Pagu anggaran Pusdiklat BPS tahun 2019 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 (Juta rupiah)

Program / Sumber Dana	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 DMPTTL	66.250,77	1.763,29	68.014,06	99,07
02 PSPA	635,76	-	635,76	0,93
Total	66.886,53	1.763,29	68.649,82	100,00

Dari Tabel 12 dapat dilihat pula bahwa Program DMPTTL memberikan kontribusi terbesar terhadap pagu anggaran Pusdiklat BPS yaitu sebesar 99,07 persen dan hanya sebagian kecil untuk Program PSPA yaitu sebesar 0,93 persen.

Pagu dan Realisasi Anggaran 2019

Pada Tabel 13 dapat dilihat realisasi anggaran yang telah digunakan Pusdiklat untuk mendukung capaian kinerja tujuan maupun sasaran indikator yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, dari total pagu anggaran sebanyak Rp 68.649,82 juta telah direalisasikan anggaran sebanyak Rp 65.135,64 juta atau sekitar 94,88 persen.

1. Program DMPTTL

Pada Program DMPTTL terdapat 3 (tiga) output yaitu Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Layanan Dukungan Manajemen Satker, serta Layanan Perkantoran.

1a. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Untuk output Layanan Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan anggaran sebesar 91,47 persen yaitu Rp 33.795,04 juta dari pagu anggaran Rp 36.948,47 juta. Pada output tersebut terdapat 2 (dua) komponen yang masing-masing telah direalisasikan anggarannya. Komponen pertama adalah Standardisasi dan Sertifikasi yang terdiri dari sub komponen diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat-diklat sertifikasi telah direalisasikan anggaran sebesar 79,39 persen yaitu Rp 4.723,98 juta dari pagu anggaran Rp 5.950,06 juta.

Sebagian besar realisasi pada kegiatan diklat-diklat yang terdapat pada komponen Standardisasi dan Sertifikasi tersebut persentasenya berkisar antara 80-96 persen. Pada Sub komponen Jasa Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional (PNBP) terserap anggaran 62,23 persen karena adanya keterbatasan waktu dan tempat sehingga tidak dapat bekerjasama dengan instansi lainnya.

Pada komponen kedua yaitu Pengembangan Kompetensi direalisasikan anggaran sebesar 93,78 persen yaitu Rp 29.071,06 juta dari pagu anggaran Rp 30.998,42 juta. Anggaran terbesar terdapat pada subkomponen Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang terdiri dari 815 peserta diklat (22 angkatan) dan telah terealisasi sebesar 94,05 persen. Pada komponen tersebut realisasi terendah pada sub komponen Jasa Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan (PNBP) dengan persentase realisasi sebesar 54,18 persen. Hal ini terjadi karena keterbatasan kelas dan kamar asrama serta jadwal diklat yang padat sehingga tidak dapat menerima seluruh calon peserta dari instansi luar.

1b. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Output Layanan Dukungan Manajemen Satker merupakan output yang baru pertama kali muncul pada tahun anggaran 2019. Anggaran pada output ini digunakan untuk

mendukung kegiatan pelaksanaan diklat dan kegiatan rintisan pendidikan gelar. Dari pagu anggaran sebanyak Rp 14.459,96 juta telah direalisasikan Rp 14.275,73 juta atau sebesar 98,75 persen.

Kontribusi terbesar pada komponen ini adalah sub komponen Pengelolaan Pegawai yaitu terserap anggaran sebesar 99,32 persen atau Rp 13.795,90 juta dari pagu anggaran Rp 13.889,68 juta. Pada sub komponen tersebut sebagian besar adalah anggaran untuk Rintisan Pendidikan Gelar. Pada Rintisan Gelar telah direalisasikan anggaran untuk keperluan peserta tugas belajar berupa uang bantuan biaya hidup, uang buku dan referensi, bantuan riset/penelitian/seminar, dan biaya pendidikan ke masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula biaya perjalanan pemanggilan/pemulangan peserta tugas belajar dan perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi. Selain itu didalamnya terdapat pula anggaran untuk membiayai pengembangan kompetensi pegawai Pusdiklat baik staf maupun widyaiswara melalui diklat-diklat di instansi atau lembaga terkait seperti LAN RI, Kominfo, dll yang sangat berguna dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar dan kemajuan IT Pusdiklat.

1c. Layanan Perkantoran

Penyerapan anggaran pada output Layanan Perkantoran adalah sebesar 98,92 persen yaitu Rp 16.426,11 juta dari pagu anggaran Rp 16.605,63 juta, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai berupa komponen Gaji dan Tunjangan dengan realisasi sebesar 98,56 persen.

Sementara itu, untuk belanja barang terdapat pada komponen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan realisasi sebesar 99,92 persen.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPA)

Sementara itu, pada Program PSPA yaitu output Layanan Internal direalisasikan sebesar 100,00 persen, dengan anggaran sebanyak Rp 635,76 juta berupa belanja modal terdiri dari pengadaan kendaraan bermotor roda empat, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun Anggaran 2019 (Juta Rupiah)

Kode	Uraian	Pagu 2019	Realisasi 2019	% Realisasi
	Total Pagu Anggaran (DMPTTL + PSPA)	68.649,82	65.135,64	94,88
054.01.01	Program DMPTTL	68.014,06	64.499,88	94,83
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	68.014,06	64.499,88	94,83
2887.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan [Base Line]	36.948,47	33.795,04	91,47
051	Standardisasi dan sertifikasi	5.950,06	4.723,98	79,39
F	Diklat Teknis Substansi (Penulisan KTI)	461,59	413,17	89,51
G	Diklat Teknis Substansi Komputer (Analisis Big Data Dengan R)	352,73	328,35	93,09
H	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	340,83	284,66	83,52
I	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	316,90	218,47	68,94
J	Jasa Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional (PNBP)	1.112,68	692,48	62,23
K	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	824,67	796,63	96,60
L	Diklat Bendaharawan	614,35	588,84	95,85
M	Diklat Teknis Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	277,44	99,66	35,92
N	Pelatihan Unit Kompetensi Tertentu Bagi PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pem.	98,85	88,34	89,37
O	Pelatihan Statistik Sektoral	672,03	576,09	85,72
P	Diklat Okupasi dan Sertifikasi PPK	260,92	139,31	53,39
Q	Diklat Okupasi dan Sertifikasi PPK BPS Daerah	617,08	497,97	80,70
	**			
052	Pengembangan kompetensi	30.998,42	29.071,06	93,78
A	Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III	24.598,70	23.135,74	94,05
B	Diklatpim Tingkat IV	3.809,92	3.774,72	99,08
C	Diklatpim Tingkat III	1.442,14	1.425,08	98,82
D	Diklatpim Tingkat II	447,69	340,41	76,04
E	Jasa Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan (PNBP)	650,61	352,49	54,18
F	Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II	49,37	42,62	86,34
	**			
2887.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	14.459,96	14.278,73	98,75
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	28,80	20,59	71,50
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	6,00	0,00	0,00
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	64,39	32,47	50,43

054	Pengelolaan kepegawaian	13.889,68	13.795,90	99,32
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	471,10	429,77	91,23
	**			
2887.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	16.605,63	16.426,11	98,92
001	Gaji dan Tunjangan	12.220,96	12.044,80	98,56
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.384,67	4.381,31	99,92
	**			
054.01.02	Program PSPA	635,76	635,76	100,00
2890	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	635,76	635,76	100,00
2890.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	635,76	635,76	100,00
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	488,46	488,46	100,00
052	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	67,73	67,73	100,00
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	79,57	79,57	100,00

Sebagai gambaran realisasi dan sisa anggaran Pusdiklat BPS tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 30.



Gambar 30. Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2019

3.7. Penghargaan Tahun 2019

Pada tahun 2019 Pusdiklat BPS telah mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dalam rangka menyelenggarakan Program:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Tk III dengan kualifikasi B
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Tk IV dengan kualifikasi A

c. Pelatihan Dasar CPNS dengan kualifikasi A



Gambar 31. Penyerahan Sertifikat Akreditasi oleh LAN RI

2. Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019 Kategori Lembaga Pemerintah Pusat Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan pelatihan Dasar CPNS Peringkat II



Gambar 32. Penyerahan Pusdiklat Berprestasi oleh LAN RI

3. Penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Indonesia



Gambar 33. Penghargaan dari UI

BAB IV

PENUTUP



4.1. Tinjauan Umum

Seiring dengan tuntutan BPS untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan yang prima kepada pengguna data, Pusdiklat BPS juga dihadapi tantangan untuk menyediakan SDM yang lebih berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPS.

Untuk memenuhi tantangan yang dihadapi dan mempermudah pencapaiannya, Pusdiklat BPS menyusun satu tujuan capaian kinerja, dua sasaran strategis dan delapan indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019. Tujuan capaian kinerja yang telah dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2019 adalah terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Sedangkan sasaran strategis yang telah dicapai adalah (i) meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima dan (ii) meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan.

Capaian kinerja tujuan Pusdiklat BPS pada tahun 2019 adalah sebesar 93,11 persen. Dengan angka diatas 90 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2019 cukup memuaskan dengan mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Namun, diperlukan kerja keras lagi dari semua pihak agar capaian kinerja dapat mencapai sesuai target bahkan melebihi dari target yang diharapkan.

Di sisi lain, jika dilihat menurut indikator sasaran, yaitu "Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima" serta "Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan", rata-rata capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi target atau diatas 100 persen yaitu mencapai 103,65 persen.

Sejalan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yang telah melebihi target, dapat dilihat bahwa dari sisi peserta diklat hasilnya sangat memuaskan dimana capaiannya telah melebihi target. Hal ini terbukti dari angka capaian kinerja pada indikator "Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan" yaitu sebesar 105,26 persen, "Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik" sebesar 109,05 persen, dan "Persentase peserta Diklat Pengadaan Barang/Jasa yang Lulus" sebesar 109,52 persen.

Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusdiklat BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi visi dan misi Pusdiklat BPS.

Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Untuk mencapai target yang diinginkan tentunya hal ini perlu tindak lanjut sehingga diharapkan pencapaian pada tahun depan dapat ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya.

4.2. Tindak Lanjut

Pada tahun 2019, terdapat dua indikator yang capaian kerjanya kurang dari 100 persen. Meskipun kurang dari target namun kedua indikator tersebut masih dapat dikatakan cukup memuaskan karena capaian kerjanya sudah lebih dari 90 persen. Indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat dengan capaian sebesar 93,11 persen. Namun hal ini perlu tetap menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti agar tahun-tahun berikutnya dapat menghasilkan kinerja yang lebih memuaskan. Salah satu faktor adalah dengan meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak penyelenggara dalam hal ini pimpinan/struktural, widyaiswara/pengajar, dan seluruh pegawai Pusdiklat BPS untuk meningkatkan kinerja masing-masing sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Meningkatkan kualitas pelaksanaan *before of campuss* pada tahun yang akan datang Pusdiklat harus lebih meningkatkan pemasaran produk-produk inovasi yang telah dilaksanakan peserta diklat. Pelaksanaan diklat okupasi diselenggarakan bekerjasama dengan Dirjen Perbendaharaan utk lebih efisiensi

Memperluas pelaksanaan diklat PBJ di daerah seperti yg sudah dilaksanakan tahun 2019 dengan daerah Jawa Timur, Maluku Utara dan Kaltim dengan metode *blended learning* agar jumlah SDM yang memperkuat pelaksanaan administrasi daerah terpenuhi.

Selain itu, indikator dengan capaian kinerja kurang dari 90 persen adalah jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS dengan capaian sebesar 99,16 persen. Capaiannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dari target sebanyak 119 pegawai, terealisasi 118 pegawai mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Hal tersebut

disebabkan karena pascasarjana S3 ITB tidak ada yang mendaftar sehingga yang awalnya disediakan kuota untuk satu peserta menjadi ditiadakan.

Kedua indikator tersebut di atas menghasilkan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan target tahun-tahun sebelumnya pada Renstra periode tahun 2015-2019. Untuk itu, dalam mempersiapkan Renstra periode tahun 2020-2024 perlu digali informasi lebih dalam lagi pada proses perencanaan menentukan target indikator-indikator tersebut atau mencari solusi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusdiklat BPS periode tahun 2020-2024, tindak lanjut tidak hanya dilakukan terhadap indikator yang capaiannya kurang dari 90 persen, namun perlu juga dilakukan penajaman terhadap beberapa indikator/IKU sehingga pengukuran keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS menjadi lebih relevan. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya.

Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan:

1. Kategori kelulusan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan: Pengukuran kategori kelulusan peserta diklat perlu dikaji ulang agar memperoleh indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat. Penentuan kelulusan peserta berdasarkan penilaian terhadap aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Adanya pola baru pada diklatpim dan prajabatan, untuk nilai akademis selain penilaian ujian di dalam kelas, juga berdasarkan penyusunan kertas kerja aktualisasi bagi peserta diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi peserta diklatpim. Hasil penyusunan kertas kerja tersebut diseminarkan baik pada saat rancangan maupun evaluasi akhir. Seminar evaluasi akhir dilakukan setelah dua bulan *off campus* sehingga penentuan kelulusan tidak dapat dilakukan segera setelah diklat selesai. Hal ini berpengaruh terhadap pengukuran capaian kinerja triwulanan karena persentase kelulusan diperoleh setelah selesai seminar. Jika sebelumnya indikator yang dihitung adalah persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan, maka untuk ke depannya dapat ditambah dengan manfaat yang dirasakan/diperoleh dari hasil Diklat dan Realisasi dari Komitmen Tindak Lanjut bagi peserta Diklatpim dan Rencana Aksi bagi peserta Diklat Prajabatan.
2. Surat Izin Belajar: Perlu perubahan indikator dalam rangka mengukur keberhasilan pengelolaan izin belajar. Bukan hanya dilihat dari persentase Surat izin Belajar yang diselesaikan, melainkan juga dilihat dari sisi *outcome* yang dihasilkan seperti

penyelesaian proses izin belajar yang tepat waktu. Dengan demikian capaian indikator akan lebih berkualitas.

3. Tugas Belajar yang dibiayai BPS: Seperti halnya pada indikator penyelesaian surat izin belajar, perlu perubahan pula indikator dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan tugas belajar. Jika sebelumnya hanya dihitung jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS, maka kedepan harus dilihat dari sisi *outcome* yang dihasilkan.
4. Dalam rangka meningkatkan kinerja widyaiswara sebagai ujung tombak pengajar diklat, perlu dimasukkan indikator yang dapat menunjang sasaran strategis meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima.
5. Diperlukan tambahan indikator yang dapat memperkuat pengukuran indikator kinerja terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai melalui warung kompetensi pegawai (Warkop).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Satuan Kerja: Pusdiklat BPS						
	SS.1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan					
	1.1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	91%	92%	93%	94%
	1.2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	91%	92%	93%	94%
	1.3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	92%	94%	95%	96%
	1.4. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	1.5. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242	265	280	320	324
	SS.2. Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan					
	2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75

Lampiran 2. Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
T. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	-	-	94 %	95 %	96 %
	SS.1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima					
	IKSS 1.1. Persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
	IKSS 1.2. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
	IKSS 1.3. Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	-	-	80 %	80 %	80 %
	IKSS 1.4. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	90 %	92 %	94 %	95 %	96 %
	IKSS 1.5. Persentase surat izin belajar yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	IKSS 1.6. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibayai BPS	242	265	280	320	324
	SS.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan					
	IKSS 2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2019

PERSOALAN PERJANJIAN KINERJA
KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PELAKSANA
PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Marudiono S.Si., MPM
Jabatan: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama: Dr. Adi Lanteksono, M.A.
Jabatan: Sekretaris Utama
Kantor/Kepala Lembaga pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sebaromnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua:

Dr. Adi Lanteksono, M.A.
NIP. 19640831 198302 1 002

Jakarta, 27 Maret 2019
Pihak Pertama

Marudiono S.Si., MPM
NIP. 19640814 198512 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tujuan/Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase Kepuasan Peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,5
Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	95
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95
	Persentase Peserta Diklat pengadaan Barang dan Jasa yang lulus	Persen	80
	Persentase Peserta Diklat Bendahara yang lulus	Persen	80
	Persentase Kepuasan Peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,5
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	119
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (PPS)	Rp. 57.784.900.000,-
2. Penyelenggaraan Seminar dan Pelatihan Aparatur Negara (PS) serta Operasional Perencanaan Latihan	Rp. 650.677.000,-
Jumlah	Rp. 58.435.667.000,-

Pihak Kedua


Tri Adi Lumbungu, S.P.A.
 NIP. 19600831 198202 1 002

Jakarta, 27 Maret 2019
 Pihak Pertama


Marudjono S.S., MM
 NIP. 19640814 198702 1 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,50	85,20	93,11
SS1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	95,00	100,00	105,26
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00	103,60	109,05
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	80,00	87,62	109,52
Persentase Peserta Diklat Bendaharawan yang Lulus	Persen	80,00	90,00	112,50
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	91,50	85,20	93,11
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	119	118	99,16
SS2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70	70,39	100,56
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan				93,11
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,65

Lampiran 6. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2019

No.	Unit Organisasi	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala Pusdiklat	1	-	-	-	-	1
2.	Bagian Tata Usaha	-	1	2	-	30	33
3.	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	-	1	2	-	8	11
4.	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	-	1	2	-	5	8
5.	Widyaiswara	-	-	-	22	-	22
Jumlah		1	3	6	22	43	75

Lampiran 7. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan Akhir Tahun 2019

Jabatan Fungsional	Ahli				Total
	Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Widyaiswara	2	11	8	1	22
Jumlah	2	11	8	1	22

Lampiran 8. Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2019

(A)	(B)	(C)	(D)	Laki-laki		Jumlah
				(E)	(F)	
Pendidikan S2 *)						
1.	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Informatika Tahun 2019	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI)	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	2	7
2.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika Tahun 2019	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	6	4	10
3.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika Tahun 2019	Universitas Padjadjaran	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	5	7
4.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ketenagakerjaan Tahun 2019	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	8	10
5.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Tahun 2019	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	3	7	10
6.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika Tahun 2019	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	6	4	10
7.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Tahun 2019	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	5	10
8.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Tahun 2019	Universitas Airlangga	Sumber Daya Manusia (SDM)	7	6	13
9.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Tahun 2019	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	6	4	10
10.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Kependudukan Tahun 2019	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	3	7	10
11.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Akuntansi Tahun 2019	Universitas Diponegoro	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	11	15
12.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Psikologi Tahun 2019	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	0	3	3
Pendidikan S3 *)						
13.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	0	1	1
14.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	0	1	1
15.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	0	1
Total				50	68	118

Catatan: *) Sistem kerjasama dilakukan dengan swakelola (BPS sebagai pemberi Swakelola/pertanggungjawaban anggaran di BPS)

Lampiran 9. Diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS Tahun 2019

No.	Nama Diklat	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta			Asal Peserta (BPS/Non BPS)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Diklat Prajabatan						
1.	Latsar CPNS Golongan II	2	48	22	71	7 BPS 3 LEPP 15 Pemula Kab. Bengkulu Utara 46 BAKAMLA
2.	Latsar CPNS Golongan III	22	297	517	814	813 BPS 1 Kementerian Sosial RI
Diklat Kepemimpinan						
1.	Diklatpim III	1	34	6	40	BPS
2.	Diklatpim IV	1	68	37	105	BPS
Diklat Lainnya						
1.	Diklat Teknis Substansi (Penyusunan KT)	1	12	23	35	35 BPS
2.	Diklat Teknis Substansi Komputer (Analisis Big Data Dengan R)	2	31	44	75	75 BPS
3.	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	1	15	6	22	5 NON BPS
4.	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	1	21	4	25	18 NON BPS
5.	Jasa Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional (PNBP)	3	58	7	65	65 BPS
6.	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7	133	117	250	250 BPS
7.	Kursus Bendaharawan	1	11	22	33	33 BPS
8.	Diklat Teknis Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	50	20	70	70 BPS
9.	Pelatihan Unit Kompetensi Bagi Ppk, Pokja, Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	24	16	40	40 BPS
10.	Pelatihan Statistik Sektoral	4	57	62	119	119 BPS
	Diklat Okupasi Dan Sertifikasi PPK	2	12	7	19	19 BPS
Total			895	810	1805	749

Lampiran 11. Sertifikat Akreditasi



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

Nomor : SR5/K.1/PDP/09

diberikan kepada :

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PUSAT STATISTIK

sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program :

1. Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori **Akreditasi A** untuk masa berlaku 5 (lima) tahun;
2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori **Akreditasi A** untuk masa berlaku 5 (lima) tahun; dan
3. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori **Akreditasi B** untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun;

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 394/K.1/PDP.09/2019 tentang Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.



Jakarta, 22 Mei 2019

KEPALA,

ADI SURYANTO







LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun Anggaran 2019



Address : Jl. Raya Jagakarsa No. 70
Phone : (021) 7873702-83
E-mail : pusdiklat@bps.go.id
Fax : (021) 7873955, 7875487